

**DETERMINAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR)  
DALAM *WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun  
2017-2018)**



No. Mahasiswa: 16312269

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**DETERMINAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR) DALAM  
*WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2018)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Melisa Livana

No. Mahasiswa: 16312269

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 07 Juli 2020

Penulis,



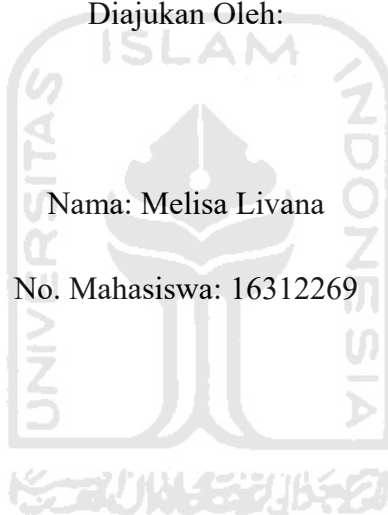
(Melisa Livana)

**DETERMINAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR) DALAM  
*WEBSITE* PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2018)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:



Nama: Melisa Livana

No. Mahasiswa: 16312269

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 06 Juli 2020

Dosen Pembimbing,



(Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**DETERMINAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DALAM WEBSITE  
PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
INDONESIA TAHUN 2017-2018)**

Disusun Oleh : **MELISA LIVANA**

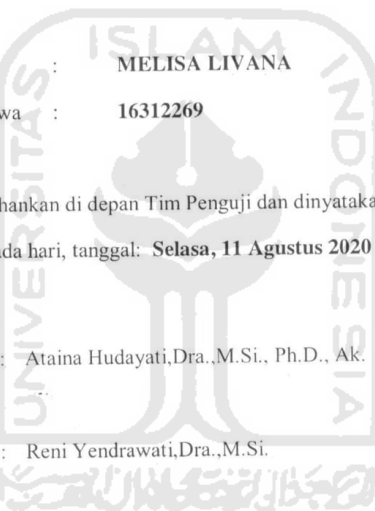
Nomor Mahasiswa : **16312269**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 11 Agustus 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Ataina Hidayati, Dra., M.Si., Ph.D., Ak.**

Penguji : **Reni Yendrawati, Dra., M.Si.**



*Ataina Hidayati*  
.....  
*Reni Yendrawati*  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

## MOTTO

***“Jadilah hamba-Nya yang selalu taat atas perintah-Nya”***

(Ibu Hj. Lilis Setiawati, Ibunda tercinta)

***“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,.....”***

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

***“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang maha hidup, terus menerus mengurus makhluk-Nya”***

(QS. Ali-Imran [3]: 2)

***“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”***

(QS. AN-Nisa [4]: 36)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya,

Bapak **H. Mulyono** dan Ibu **Hj. Lilis Setiawati** yang tak henti-hentinya selalu memberi saya kasih sayang, dukungan, dan motivasi kepada saya serta doa-doa yang telah dipanjatkan untuk saya dapat terus melangkah menuju masa depan yang cerah.

Kakak-kakak saya,

**Andri Irawan, S.E dan Novi Febrianty, S.Ked**

Yang selalu bisa mendengarkan keluh kesah saya dalam segala hal yang saya rasakan, serta berbagai motivasi dan dukungan yang diberikan dengan tujuan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Keluarga dan sahabat-sahabat saya dibangku sekolah maupun perkuliahan yang senantiasa memberikan doa untuk dapat menjadi insan yang baik.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas ridho, rahmat, berkah, rizki dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Serta tak lupa penulis junjungkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafa'atnya dan telah menuntun umat manusia kejalan kebenaran. Penelitian ini dengan judul “**DETERMINAN *INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2018)***”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis dapat menyelesaikannya dengan adanya bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak **H. Mulyono** dan Ibu **Hj. Lilis Setiawati** selaku kedua orang tua penulis yang telah mendidik penulis serta selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.
2. **Andri Irawan, S.E dan Novi Febrianty, S.Ked** selaku kedua kakak penulis yang senantiasa memberikan dukungan, saran, serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu **Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si., Ph.D.** Selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan serta kritik, saran dan waktu yang telah diluangkan yang diberikan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan benar dan tepat waktu.
4. Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak **Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak **Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak., CMA** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada/Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi, seluruh pegawai perpustakaan FBE UII, serta seluruh Bapak/Ibu pegawai dan staff keluarga besar FBE UII.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan bimbingan dalam menjalankan perkuliahan.

9. Ibu dan Bapak penjaga kos Pondok Aulia, yang selalu membantu penulis dalam menjalankan kegiatan perkuliahan penulis.
10. Teman-teman **(Kuli)ah**, Yuliana, Putri, Aau, Sakilah, Nuken, Aulia, Dina, dan Sri Nita yang telah memberikan kesan menyenangkan maupun menyedihkan dalam hidup penulis selama masa perkuliahan dan semoga kita dapat berjumpa kembali diwaktu yang akan datang.
11. **Dua Sembilan (29)**, Riza Amrik, Wuri, dan Dwi. Terimakasih sudah selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi.
12. **OT8**, Ayu, Novia, Rhea, Dhani, Alam, Garda dan Bella teman masa sekolah penulis, Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis selama masa sekolah maupun masa perkuliahan.
13. Teman-teman satu bimbingan penulis yang saling memberikan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
14. Teman KKN unit 61, Caca, Pije, Alfian, Lina, Corina, Abi, dan Rayhan terimakasih telah memberikan pelajaran baru untuk penulis dalam hal apapun.
15. Teman-teman angkatan 2016 prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik perlu bagi penulis untuk dapat memperbaiki dalam penelitian selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat

memberikan inspirasi dan manfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doa dari semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 07 Juli 2020

Penulis,



Melisa Livana

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMA JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II .....	12
KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 LANDASAN TEORI.....	12
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12
2.1.2 Teori <i>Signalling</i> .....	14
2.1.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	15
2.1.4 <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).....	16
2.1.5 Transparansi ( <i>Transparency</i> ) .....	17

2.1.6	Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ) .....	18
2.2	PENELITIAN TERDAHULU .....	18
2.3	HIPOTESIS PENELITIAN .....	23
2.3.1	Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Internet Financial Reporting (IFR) dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	23
2.3.2	Pengaruh Opini Audit Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	25
2.3.3	Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	26
2.3.4	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	28
2.3.5	Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam <i>Website</i> Pemerintah Daerah.....	29
2.4	Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III.....		32
METODE PENELITIAN .....		32
3.1	POPULASI DAN SAMPEL .....	32
3.2	VARIABEL PENELITIAN .....	33
3.3.1	Variabel Dependen.....	33
3.3.2	Variabel Independen .....	34
3.3	METODE PENGUMPULAN DATA.....	36
3.4	TEKNIK ANALISA DATA .....	37
3.4.1	Statistik Deskriptif .....	37
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4.3	Analisis Regresi Berganda .....	40
3.4.4	Pengujian Hipotesis.....	41
BAB IV.....		42
DATA DAN PEMBAHASAN .....		42

4.1	DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN .....	42
4.2	STATISTIK DESKRIPTIF .....	43
4.3	ASUMSI KLASIK.....	46
4.3.1	Uji Multikolonieritas.....	46
4.3.2	Uji Autokorelasi .....	47
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	47
4.3.4	Uji Normalitas.....	48
4.4	ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA.....	50
4.5	PENGUJIAN HIPOTESIS.....	53
4.5.1	Koefisien Determinasi.....	53
4.5.2	Uji Parsial ( <i>t test</i> ) .....	54
4.6	PEMBAHASAN .....	56
4.6.1	Tingkat Ketergantungan Berpengaruh Positif Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dalam <i>Website</i> pada Pemerintah Daerah.....	56
4.6.2	Opini Audit Berpengaruh Positif Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> dalam <i>Website</i> Pada Pemerintah Daerah.....	58
4.6.3	Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> dalam <i>Website</i> Pada Pemerintah Daerah.....	59
4.6.4	Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> dalam <i>Website</i> Pada Pemerintah Daerah .....	60
4.6.5	Kekayaan Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> dalam <i>Website</i> Pada Pemerintah Daerah .....	62
BAB V	.....	64
	SIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1	SIMPULAN .....	64
5.2	SARAN .....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	68

## DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Pengambilan Sampel Penelitian.....	42
4.2 Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif.....	43
4.3 Statistik Deskriptif untuk Variabel Opini Audit.....	45
4.4 Hasil Uji Multikolonieritas.....	46
4.5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson.....	47
4.6 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.....	49
4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
4.8 Uji Koefisien Determinasi.....	53



## DAFTAR GAMBAR

4.1 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	48
4.2 Grafik Histogram dalam Uji Normalitas.....	49
4.3 Grafik Plot Linear dalam Uji Normalitas.....	50





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indeks Skoring <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR).....	73
Lampiran 2 Skoring Praktik <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) .....	75
Lampiran 3 Variabel Tingkat Ketergantungan ( <i>DEPEND</i> ).....	86
Lampiran 4 Variabel Opini Audit (OP), Jumlah Penduduk ( <i>POPUL</i> ) Dan Ukuran Pemerintah Daerah ( <i>SIZE</i> ) .....	90
Lampiran 5 Variabel Kekayaan Pemerintah Daerah ( <i>WEALTH</i> ).....	94
Lampiran 6 Hasil Pengujian Menggunakan Spss.....	98



## ABSTRACT

*This study aims to identify the factors that can influence internet financial reporting (IFR) on the website of local governments in Indonesia for the year of 2017-2018. In this study the level of dependency, audit opinion, population, size of local government, and local government wealth are independent variables. The number of samples used was 61 districts or cities selected based on the purposive sampling method. The analysis and testing methods used in this study are descriptive statistics and multiple linear regression analysis with SPSS statistical programs. The results of this study indicate that the audit opinion had a significant effect on internet financial reporting (IFR) on the local government website. Meanwhile, the level of dependency, population, size of local government, local government wealth does not affect the internet financial reporting (IFR) on the local government website.*

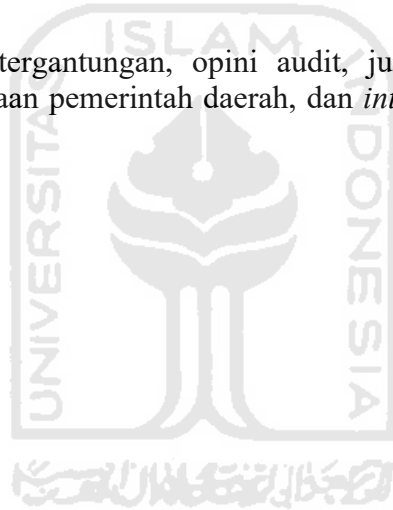
**Keywords:** *Level of dependency, audit opinion, population, size of local government, local government wealth, and internet financial reporting (IFR).*



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017-2018. Dalam penelitian ini tingkat ketergantungan, opini audit, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, dan kekayaan daerah merupakan variabel independen. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 61 kabupaten atau kota yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Metode analisis dan pengujian yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linear berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah. Sementara, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** tingkat ketergantungan, opini audit, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan *internet financial reporting* (IFR).



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta sistem informasi pada saat ini, yang telah memberikan pengaruh terhadap sistem pada sektor pemerintahan di Indonesia yang ditandai dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis elektronik (*e-government*) (Alwi dan Bachtiar, 2014). Saat ini aktivitas manajemen keuangan dalam pemerintah pusat dan daerah telah didukung dengan adanya teknologi informasi yang memadai dengan pemanfaatan hal tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap adanya transparansi dan akuntabilitas pada informasi keuangan pemerintah dengan tujuan agar adanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor pemerintahan melalui situs resmi yang dimiliki masing-masing pemerintah digunakan sebagai sarana dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan melalui media internet atau disebut sebagai *Internet Financial Reporting* (IFR). Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar pemerintah dapat transparan terhadap kinerja pemerintahan yang didukung dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2010 mengenai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang di mana setiap pemerintah melakukan penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah serta informasi publik yang

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi terkecuali informasi yang ketat dan terbatas. Kemudian informasi publik harus dapat diakses dan didapatkan oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya rendah, serta dengan cara yang sederhana atau mudah.

Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR) ini dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan keuangan kepada berbagai pihak, baik masyarakat, investor, kreditor, atau pihak-pihak yang terkait dengan pengungkapan informasi tersebut. Puspita dan Martani (2012), mengatakan bahwa transparansi keuangan dan kinerja pemerintah penting untuk dipublikasikan melalui *website* pemerintah karena mengingat dengan media internet memiliki cakupan yang luas dan biaya yang digunakan dalam mengakses akan relatif murah.

Di tahun 2012 pemerintah pusat mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Dimana instruksi tersebut menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam mempublikasikan informasi keuangan sebanyak 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah dalam situs resmi. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keuangan melalui internet (Nosihana dan Yaya, 2016).

Namun demikian, saat ini hanya terdapat beberapa pemerintah daerah yang memanfaatkan media internet sebagai sarana dalam melakukan pelaporan keuangan (Yustikasari, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad (2014) yang menyatakan publikasi mengenai laporan keuangan yang lengkap belum dilakukan oleh seluruh pemerintah daerah. Menurut

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mayoritas pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan pengungkapan pengelolaan anggaran melalui situs resminya dikarenakan sifat dari pengungkapan informasi keuangan melalui internet hanya sukarela sebab belum ada sanksi yang mengikat (Nosihana dan Yaya, 2016). Dengan belum adanya sanksi yang mengikat mengenai tidak melakukan publikasi informasi keuangan, maka mengakibatkan kurangnya pemanfaatan dalam penggunaan *website* dengan tujuan untuk lebih transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet di Indonesia dari tahun-ketahun relatif meningkat. Dimana pada tahun 2017 mencapai 54,68% atau sebanyak 143,26jt penduduk yang menggunakan internet dan pada tahun 2018 sebesar 64,8% atau 171,17jt penduduk yang menggunakan internet. Berdasarkan data tersebut akan mengindikasikan adanya tekanan yang muncul bagi pemerintah untuk dapat melakukan publikasi informasi keuangan melalui internet secara rutin agar adanya transparansi terhadap kinerja pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah belum memaksimalkan penggunaan *website* sebagai sarana dalam menyampaikan informasi keuangan mengenai pengelolaan sumber daya (Sofyan dan Dwirama, 2019).

Akuntabilitas pemerintah dan tanggapannya terhadap permintaan publik akan informasi dan layanan merupakan kontribusi penting terhadap pemerintah yang transparan (Perez, Boliviar, dan Hernandez, 2007) maka dengan melakukan *internet financial reporting* (IFR) oleh pemerintah daerah diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindakan yang dinilai menyimpang seperti adanya penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dapat terjadi dalam pemerintahan. Dengan melakukan IFR sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah merupakan indikator bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik.

Sejumlah penelitian mengenai faktor-faktor pemerintah daerah untuk melaksanakan *Internet Financial Reporting* (IFR) telah dilakukan, seperti García dan García, (2010) telah melakukan penelitian mengenai pelaporan keuangan secara sukarela melalui internet yang dilakukan di Pemerintah Daerah Spanish. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Ukuran, *politic competition*, *capital investment*, mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi akuntansi di internet, sedangkan *Leverage*, *press visibility* mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi akuntansi di internet. Kemudian Styles dan Tennyson (2007) melakukan penelitian serupa, dimana hasil dalam penelitiannya membuktikan pendapatan perkapita, ukuran pemda, dan kualitas pengungkapan LK terdapatnya hubungan yang positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan dalam situs resmi pemda di AS. Sedangkan, pada pendapatan perkapita, ukuran pemda, tingkat hutang dan kondisi keuangan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam situs resmi pemda AS.

Di Indonesia penelitian mengenai *internet financial reporting* (IFR) juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, hasil dari penelitian yang dilakukan masih terdapat hasil yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan atas hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2017) melakukan penelitian dengan hasil belanja daerah berpengaruh terhadap IFR, sedangkan pendapatan daerah, jumlah anggota DPRD, jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap IFR, dan IFR tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Ditahun yang sama penelitian yang dilakukan Rosita dan Arifin (2017) menunjukkan hasil bahwa belanja daerah dan umur administratif terdapatnya pengaruh yang positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan, sedangkan pada kekayaan daerah, pendapatan per kapita dan pendapatan asli daerah (PAD) tidak terdapatnya pengaruh yang positif signifikan dan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012), Trisnawati dan Achmad (2014), Rahman, Sutaryo, dan Budiatmo (2013), Jatmiko dan Kumara (2015), Verawaty (2015), Nosihana dan Yaya (2016), Rahim dan Martani (2016), Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018), Hanifah dkk (2017), Hendriyani dan Tahar (2015), Prima dan Verawaty (2018), dan Kholifah (2019)

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016). Dalam penelitian tersebut menggunakan variabel independen kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan hutang, kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam



penelitian ini menambahkan variabel tingkat ketergantungan pemda dan jumlah penduduk.

Dalam penambahan variabel tingkat ketergantungan pemda dikarenakan dalam pelaksanaan pemerintahan, dengan tingginya tingkat ketergantungan pada dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat (dana alokasi umum) maka akan adanya pengawasan terhadap pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Sehingga, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan mengenai informasi keuangan dalam situs resmi pemerintah daerah (Puspita dan Martani, 2012). Kemudian adanya ketidakkonsistenan dalam pengujian mengenai tingkat ketergantungan seperti penelitian yang dilakukan Puspita dan Martani (2012) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dalam *website* pemda. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendriyani dan Tahar (2015) dan Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Penambahan untuk variabel jumlah penduduk dikarenakan jumlah penduduk yang besar akan mencerminkan kebutuhan yang besar pula akan layanan yang diberikan publik pada setiap daerah (Rahim dan Martani, 2016). Pada penelitian terdahulu dimana adanya ketidakkonsistenan dari hasil yang dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko dan Kumara (2015), Prima dan Verawaty (2018) dan Rahim dan Martani (2016) bahwa adanya hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemda. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty

(2015), Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2017), Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018), dan Kholifah (2019) bahwa tidak adanya pengaruh jumlah penduduk terhadap pengungkapan informasi keuangan di internet.

Pada penelitian ini tidak menggunakan variabel rasio pembiayaan hutang karena hasil pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang konsisten memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemda seperti penelitian yang dilakukan oleh Laswad dkk (2005), (García dan García, 2010), Nosihana dan Yaya (2016), Verawaty (2015), Rosita dan Arifin (2017), Prima dan Verawaty (2018) dan Kholifah (2019). Kemudian tidak menggunakan variabel tipe pemerintah daerah dikarenakan dari penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hasil yang cenderung konsisten tidak berpengaruh dan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen sesuai dengan penelitian yang dilakukan Jatmiko dan Kumara (2015), Nosihana dan Yaya (2016), Prima Dan Verawaty (2018), Trisnawati dan Achmad (2014), Kholifah (2019). Sedangkan tidak menggunakan variabel kompetisi politik dikarenakan variabel tersebut menunjukkan hasil yang konsisten bahwa adanya hubungan yang positif antara kompetisi politik terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* pemda seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (García dan García, 2010), Rahman, Sutaryo, dan Budiatmanto (2013), Trisnawati dan Achmad (2014), Alwi dan Bachtiar (2014), Rahim & Martani (2016), Nosihana dan Yaya (2016), Sofyani dan Dwirama (2019).

Dalam penelitian ini untuk mengetahui perkembangan terbaru pada keadaan pemerintah daerah, serta sesuai saran dari penelitian terdahulu agar dapat membuat

kondisi perbandingan pelaporan keuangan di internet oleh pemda antar periode waktu tertentu. Maka dari itu periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode pemerintahan pada tahun 2017-2018. Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul “**DETERMINAN INTERNET FINANCIAL REPORTING (IFR) DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2017-2018)**”

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah tingkat ketergantungan pemda berpengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah?
- b. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah?
- c. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah?
- d. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah?
- e. Apakah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menguji dan membuktikan

apakah variabel-variabel seperti tingkat ketergantungan, opini audit, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap *internet financial reporting* (ifr) dalam *website* pada pemerintah daerah di Indonesia.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan melalui internet.

b. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan dari aspek layanan dalam menyajikan laporan keuangan melalui media internet. Agar masyarakat lebih mudah dalam mengawasi pengelolaan keuangan pada sektor pemerintah.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan untuk dapat menjadi referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah dan dapat mengembangkan berbagai penelitian yang sudah ada, terkhusus pada *internet financial reporting* (IFR).

d. Bagi penulis

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan wawasan maupun pengalaman baru dalam melakukan penelitian mengenai *internet financial reporting* (IFR).

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan pada penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada penelitian ini, bab I merupakan bab utama yang dimana berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab II merupakan bab yang didalamnya menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, bab III menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada penelitian, yaitu populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, dan metode analisis data.

## **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV berisi mengenai perhitungan yang dilakukan dalam penelitian, hasil dari analisis data, beserta pembahasan mengenai variabel yang telah dilakukan pengujian.

## **BAB V KESIMPULAN**

Bab V dalam penelitian ini merupakan sebagai bab penutup yang didalamnya menunjukkan adanya kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pemberian saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa adanya hubungan antara dua pihak yang muncul akibat adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab dari satu pihak sebagai pemegang wewenang (*principal*) kepada pihak lain sebagai pengelola sumber daya (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan *principal* (Govindarajan dan Anthony, 2011). Dimana dalam sektor publik di Indonesia, yang berperan sebagai *principal* adalah masyarakat yang memberikan wewenang dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah selaku *agent*, dengan harapan bahwa *agent* dapat bertindak/melakukan pekerjaan sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh *principal*. Dimana pemerintah memiliki kewajiban tanggungjawab terhadap kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

Hubungan yang terdapat dalam teori keagenan dapat memicu timbulnya *agency problem* dan terjadi asimetri informasi. Adanya masalah ini menimbulkan ketidaksamaan proporsi informasi yang diterima antara dua pihak. Dimana pemerintah selaku pihak yang memiliki informasi lebih besar akan bertindak dan berkesempatan dalam mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pribadinya tanpa adanya komunikasi/persetujuan antara pemerintah dengan masyarakat dan tanpa menghiraukan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Masalah yang timbul dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat mengawasi kinerja ataupun keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan adanya permasalahan ini akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang dimana biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah (*agent*) maupun masyarakat (*principal*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan dibagi menjadi tiga, antara lain:

1. *Monitoring cost*, biaya yang muncul akibat adanya pengawasan terhadap *agent* dan ditanggung oleh *principal*.
2. *Bonding cost*, biaya untuk menetapkan dan memenuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* bertindak untuk kepentingan *principal* dan biaya ini ditanggung oleh *agent*.
3. *Residual cost*, berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Transparansi informasi yang dilakukan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan hubungan dua pihak antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta dapat meminimalisir adanya konflik yang terjadi (Trisnawati dan Achmad, 2014). Untuk dapat meningkatkan pengawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai pengelolaan/kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti halnya dalam pemanfaatan media internet untuk melakukan publikasi terhadap informasi keuangan berupa laporan keuangan. Melalui media internet maka dapat,



menghindari asimetri informasi yang terjadi, meminimalkan *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

### 2.1.2 Teori *Signalling*

Dalam teori ini, Evans dan Patton (1987) dalam Verawaty (2015) menjelaskan bahwa pemerintah selaku pihak yang diberikan tanggungjawab untuk dapat mengelola keuangan pemerintahan dengan baik, berusaha dalam menunjukkan signal yang positif kepada publik/masyarakat. Dimana dalam memberikan signal yang positif kepada masyarakat upaya yang dilakukan pemerintah dengan melakukan publikasi berupa laporan keuangan yang akurat, berkualitas, pengungkapan informasi secara lengkap, penjelasan lebih detail dalam *website* (Puspita dan Martani, 2012). Pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan pemerintah menunjukkan upaya pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahan dan menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan wewenang sesuai yang diberikan oleh publik. Hal ini agar masyarakat dapat terus mendukung pemerintah untuk dapat berjalan dengan optimal (Nosihana dan Yaya, 2016).

Dalam teori *signalling*, adanya dorongan untuk menunjukkan hasil kinerja beserta informasi keuangan disebabkan dengan adanya asimetri informasi yang terjadi antara pemerintah daerah (*agent*) dengan masyarakat (*principal*). Untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, apabila pemerintah daerah dapat mengurangi konflik yang terjadi. Dengan melakukan pelaporan informasi keuangan yang dapat dipercaya merupakan salah satu upaya dalam memberikan signal yang baik untuk dapat mengurangi adanya asimetri

informasi. Dalam memanfaatkan internet sebagai sarana dalam melakukan pelaporan keuangan merupakan cara yang paling efektif untuk menunjukkan signal positif kepada masyarakat, dan dapat dengan mudah untuk diakses mengenai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi. Hal ini dilakukan sebagai usaha pemerintah daerah agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanah sesuai yang diberikan masyarakat.

### **2.1.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam mewujudkan pertanggungjawaban atas implementasi dan penyelenggaraan operasional pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada publik. Pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pelaporan keuangan yang berisi mengenai hasil yang diterima dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai dasar bukti bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diberikan oleh masyarakat. Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk dari pengungkapan informasi keuangan. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyatakan tujuan dari adanya pelaporan keuangan pemerintah merupakan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, social, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah daerah ditujukan untuk dapat memenuhi tujuan umum dari pelaporan keuangan. Dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi pengguna untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, sumber daya

yang dikelola, menilai kondisi keuangan pemerintah, serta digunakan dalam membuat keputusan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Peraturan pemerintah No 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBN/APBD, pada setiap entitas pelapor/pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Dalam laporan keuangan pokok, terdapat komponen-komponen suatu set laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan keuangan.

#### **2.1.4 *Internet Financial Reporting (IFR)***

Pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet merupakan salah satu metode alternatif dalam pelaporan keuangan untuk menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang akuntabel dan transparansi serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dimana hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memenuhi dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi mengenai kinerja penyelenggaran pemerintahan dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut *Government Financial Officers Association* (2009) dalam (Alhajjriana, Nor, dan Wijaya, 2017) dalam pemanfaatan internet yang digunakan sebagai sarana pelaporan informasi keuangan dapat memberikan manfaat, seperti meningkatkan kepedulian terhadap laporan keuangan dan anggaran oleh

pemerintah, mempermudah pengguna dalam mengakses informasi keuangan, dapat meminimalisir biaya dan waktu yang akan keluar, meningkatkan komunikasi dan interaksi terhadap masyarakat.

Dalam upaya untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, akuntabel, transparan, serta memberikan pelayanan kepada publik yang berkualitas dan dapat meningkatkan kepercayaan publik, maka pemerintah perlu melakukan keterbukaan informasi keuangan melalui *website* resmi yang dapat dengan mudah untuk diakses dan dijangkau oleh banyak orang.

#### **2.1.5 Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi yang dilakukan pemerintah merupakan suatu indikasi dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari hal-hal yang dianggap menyimpang baik dalam bentuk keteraksesannya dan kebebasan bagi para pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai tata kelola, termasuk manajemen keuangan publik (Medina, 2012).

Dimana transparansi yang dilakukan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat yang didasari pada kewajiban pemerintah dalam melakukan transparansi dikarenakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dari pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan. Dengan keterbukaan dan kebebasan yang dilakukan pemerintah melalui media internet diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam jalannya pemerintahan secara efisien dan efektif.

### 2.1.6 Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Dimana dengan adanya laporan keuangan dapat dinilai sebagai bentuk akuntabilitas untuk memenuhi kewajiban pemda. Didalam laporan keuangan melaporkan hasil dari proses akuntansi keuangan pemerintah serta hasil dari pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Khalifah (2019) Terdapat dua macam akuntabilitas publik, yaitu: (1) Akuntabilitas vertical, dimana pengelolaan dana yang dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih tinggi, dan (2) akuntabilitas horizontal dimana pengelolaan dana yang pertanggungjawabannya kepada pihak publik/masyarakat.

Pelaporan keuangan melalui internet (IFR) merupakan bentuk dari akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi internet pemerintah dapat melakukan keterbukaan terhadap publik dalam memberikan informasi keuangan agar dapat menerapkan pemerintahan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti dan Judul	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Penelitian
1.	(García dan García, 2010) <i>Determinants of Online</i>	Ukuran, <i>leverage</i> , <i>politic competition</i> , <i>capital</i>	Pengungkapan informasi akuntansi di internet.	1. Ukuran, <i>politic competition</i> , <i>capital investment</i> , mempunyai pengaruh positif

	<i>Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities</i>	<i>investment, press visibility</i>		terhadap Pengungkapan informasi akuntansi di internet. 2. <i>Leverage, press visibility</i> mempunyai pengaruh negatif terhadap Pengungkapan informasi akuntansi di internet.
2.	Puspita dan Martani (2012)  Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam <i>Website</i> Pemda	Pendapatan Asli Daerah, Rasio Ketergantungan, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, Belanja Daerah	Tingkat Pengungkapan dalam <i>website</i> Pemda	1. Rasio PAD, Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan konten <i>website</i> , presentasi, pengungkapan, dan total pengungkapan. 2. Rasio ketergantungan daerah, ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan konten dan total pengungkapan <i>website</i> Pemda. 3. Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan konten <i>website</i> .
3.	Rahman, Sutaryo, dan Budiartanto (2013)	Kompetisi Politik, Ukuran, <i>Leverage</i> ,	<i>Internet Financial Local</i>	1. Kompetisi politik, kekayaan pemda, <i>leverage</i> berpengaruh positif

	Determinan <i>Internet Financial Local Government Reporting</i> di Indonesia	Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah.	<i>Government Reporting</i>	<i>internet financial local government reporting.</i> 2. Ukuran pemda, tipe, tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>internet financial local government reporting.</i>
4.	Trisnawati dan Achmad (2014)  Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet	Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> , Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah.	Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet.	1. Kompetisi politik, ukuran pemda, <i>leverage</i> , dan kekayaan pemda berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. 2. Opini audit, dan tipe pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemda melalui internet.
5.	Jatmiko dan Kumara (2015)  <i>Key Success Factors for Web-Based Financial Statements Disclosure to Create Local Government Transparency in Indonesia (Empirical</i>	Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, <i>Local Resource</i> , <i>Leverage</i> , Tipe Administrasi Daerah.	Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Web Pemerintah Daerah di Indonesia	1. Jumlah penduduk, pendapatan perkapita berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan dalam <i>website</i> pemda. 2. Kekayaan daerah, <i>leverage</i> , tipe administrasi daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

	<i>Study on Local Government in Indonesia)</i>			laporan keuangan dalam <i>website</i> pemda.
6.	Verawaty (2015)  Determinan Aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> Melalui <i>E-Government</i> Pemerintah Daerah di Indonesia	<i>Size, income per capita, debt level</i> pemda.	IFR ( <i>Internet Financial Reporting</i> ) melalui <i>e-government</i> .	1. <i>Size, income per capita, debt level</i> pemda tidak memiliki hubungan positif dengan IFR ( <i>Internet Financial Reporting</i> ) melalui <i>e-government</i> .
7.	Nosihana dan Yaya (2016)  <i>Internet Financial Reporting</i> dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia	Kompetisi Politik, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Leverage</i> , Kekayaan Pemda, Tipe Pemerintah Daerah, Opini Audit.	<i>Internet Financial Reporting</i> melalui <i>E-Government</i>	1. Kompetisi politik, ukuran pemda, <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> melalui <i>e-government</i> . 2. Kekayaan pemda, tipe pemda, opini audit tidak berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> melalui <i>e-government</i> .
8.	Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2017)  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Jumlah Anggota	<i>Internet Financial Reporting</i> Pemerintah Daerah	1. Belanja Daerah, Pendapatan Daerah berpengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> pemerintah daerah.



	Pelaporan Keuangan Di Internet Pemerintah Daerah dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah	DPRD, Jumlah Penduduk.	<b>Variabel Intervening</b> Akuntabilitas Laporan Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah anggota DPRD, jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap <i>internet financial reporting</i> pemerintah daerah.</li> <li>3. <i>Internet financial reporting</i> pemda tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas laporan keuangan daerah.</li> </ol>
9.	Prima Dan Verawaty (2018)  Determinan Aksesibilitas <i>Internet Financial Reporting</i> melalui <i>E-Government</i> Di Sumatera Bagian Selatan	<i>Size</i> pemda, <i>income per capita</i> , <i>debt of level</i> , PAD, Belanda Daerah, Kekayaan daerah, Tipe pemda.	<i>Internet Financial Reporting</i> melalui <i>e-government</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Size</i>, <i>income per capita</i>, kekayaan daerah, PAD berpengaruh positif terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> melalui <i>e-government</i>.</li> <li>2. <i>Debt of level</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> melalui <i>e-government</i>.</li> <li>3. Tipe pemda, belanja daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Internet Financial Reporting</i> melalui <i>e-government</i>.</li> </ol>
10	Nurhidayati dan Wahasumiah (2018)	PAD, Tingkat ketergantungan, Belanja daerah, <i>intergovernment</i>	Pengungkapan informasi keuangan di internet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PAD, status daerah, total aset, mempunyai pengaruh terhadap Pengungkapan</li> </ol>

	Pengaruh Kinerja Keuangan, Karakteristik Pemda Dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Di Internet	<i>al revenue</i> , Total aset, Jumlah penduduk, Status Daerah, Opini Audit		informasi keuangan di internet 2. Belanja daerah, <i>intergovernmental revenue</i> , jumlah penduduk, opini audit, tingkat ketergantungan, tidak mempunyai pengaruh terhadap Pengungkapan informasi keuangan di internet.
11	Sofyani dan Dwirama (2019)  Determinan Praktik <i>Internet Reporting</i> Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia.	Kompetisi Politik, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit.	<i>Internet Reporting</i> Pemerintah Daerah	1. Kompetisi politik, kekayaan daerah, opini audit memiliki pengaruh positif terhadap <i>internet reporting</i> pemerintah daerah.

## 2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

### 2.3.1 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Internet Financial Reporting (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah

Sebagian besar pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Robbin dan Austin (1987) dalam Puspita dan Martani (2012) menjelaskan bahwa dana perimbangan pada suatu pemda merepresentasikan tingkat ketergantungan pemerintah daerah. Dimana adanya kecenderungan pemerintah daerah meningkatkan praktik *internet financial reporting* (IFR) apabila adanya tingkat ketergantungan yang tinggi pula

oleh pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat memiliki implikasi terhadap kinerja administrasi pemerintah daerah dikarenakan apabila dana alokasi yang diterima oleh pemerintah daerah meningkat maka pemerintah pusat akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mendorong pemerintah daerah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik mengenai keteraksesan dalam mendapatkan informasi keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pada teori keagenan, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah selaku *agent* selain memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat juga perlu adanya pertanggungjawaban pada pihak pusat hal ini dikarena pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemda dalam mengelola keuangan daerah untuk menyeimbangkan keuangan melalui dana perimbangan. Hal ini serupa dengan teori *signalling*, dimana dengan tingginya tingkat ketergantungan maka akan memberikan signal yang baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat untuk menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah telah menjalankannya dengan sebagaimana mestinya serta sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya terhadap pemerintah pusat.

Tingkat ketergantungan telah dilakukan penelitian oleh Puspita dan Martani (2012) yang dimana hasil dalam penelitiannya bahwa tingkat ketergantungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan pada *website* Pemda. Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah**

### **2.3.2 Pengaruh Opini Audit Terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah**

Opini audit merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) mengenai tingkat kewajaran atas hasil kinerja pemerintah yang disajikan dalam laporan keuangan. Dimana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan kepada BPK RI agar dilakukannya audit/pemeriksaan serta dengan adanya opini yang diberikan oleh BPK RI untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Nosihana dan Yaya, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI dalam memberikan opini terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclamer of opinion*).

Pemberian opini audit WTP menunjukkan bahwa adanya pelaporan dan pelaksanaa keuangan yang baik yang dijalankan pemerintah. Pengungkapan informasi keuangan akan memberikan signal positif bagi masyarakat sehingga pemerintah cenderung akan melakukan publikasi informasi keuangan yang baik apabila memiliki opini audit yang baik (Rahim dan Martani, 2016). Menurut Trisnawati dan Achmad (2014) pemda akan cenderung untuk tidak melakukan publikasi akan hal informasi keuangan apabila dalam pemeriksaan terhadap

informasi keuangan pemda menerima opini selain dari WTP. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan berbagai pandangan atau persepsi publik mengenai kinerja dari pemerintah daerah.

Berdasarkan pada teori agensi, BPK RI selaku auditor dapat berperan penting dalam mengurangi adanya *agency problem* dikarenakan dengan adanya opini yang diberikan akan mendorong pemda dalam memberikan informasi terbuka pada publik sehingga tidak adanya ketidakseimbangan informasi keuangan. Pada teori *signalling*, apabila opini WTP yang diterima oleh pemda maka akan mendorong pemda untuk menunjukkan signal yang baik kepada publik atas baiknya penyelenggaraan pengelolaan keuangan serta akan melakukan pelaporan keuangan di internet melalui *website* pemda.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahim dan Martani (2016) dan Sofyani dan Dwirama (2019) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada *website* pemda. Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub> : Opini audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pada pemerintah daerah**

### **2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah**

Jumlah penduduk merupakan proksi dari kompleksitas pemerintah. Kompleksitas tidak menghambat tingkat pengungkapan namun bahkan dapat meningkatkan tingkat pengungkapan (Nurhidayati dan Wahasumiah, 2018). Penduduk dianggap sebagai *stakeholders* pada lembaga pemerintah daerah,

mengingat hal tersebut penduduk memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk dapat melakukan transparansi. Apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka tekanan atau permintaan akan hal publikasi informasi keuangan akan semakin meningkat (Khudri, Martani, dan Maulana, 2015). Pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan lebih memerlukan pengawasan dan pelaporan informasi keuangan yang lebih besar pula, hal ini akan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan (*bonding cost*) akan lebih tinggi. Menurut Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2017) dengan besarnya jumlah penduduk dalam suatu pemerintah daerah maka akan semakin besar biaya yang perlu dikeluarkan sebagai upaya untuk memberikan informasi secara merata agar tidak adanya asimetri informasi. Untuk dapat mengurangi biaya dalam melakukan pengawasan maka pemerintah dapat menguranginya dengan melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet yang dengan mudah dapat diakses oleh siapapun.

Dalam sektor pemerintahan, berdasarkan pada teori keagenan dengan jumlah penduduk yang besar akan menunjukkan bahwa adanya asimetri informasi yang besar pula antara *principal* dan *agent*, serta akan lebih besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan *agent* dalam menyampaikan laporan keuangan kepada *principal* (*bonding cost*).

Hilmi dan Martani (2012), Trisnawati dan Achmad (2014) Puspita dan Martani (2012), Jatmiko dan Kumara (2015) dan Prima dan Verawaty (2018) melakukan penelitian dengan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemerintah

daerah. Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pada pemerintah daerah**

#### **2.3.4 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah didasari pada besarnya aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar cenderung memiliki kekayaan yang besar pula (Trisanwati dan Achmad, 2015). Semakin besar aset yang dimiliki oleh pemda maka besar pula ukuran dari pemerintah daerah tersebut (Prima dan Verawaty, 2018). Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar umumnya akan adanya pengawasan kinerja pemerintah daerah serta kebutuhan atas pelaporan yang lebih besar pula terhadap masyarakat sehingga biaya yang akan ditanggung dalam melakukan pengawasan dan pengungkapan akan lebih besar. Dengan besarnya ukuran pemda maka akan lebih kompleks pengelolaan keuangannya sehingga informasi keuangan perlu dilakukan pengungkapan agar dapat meminimalisir adanya asimetri informasi.

Berdasarkan teori agensi, dengan ukuran pemerintahan yang besar maka diperlukanya pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat. Sehingga perlunya menyajikan laporan keuangan melalui internet dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan *agent (bonding cost)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Martani (2012), Trisnawati dan Achmad (2014), Nosihana dan Yaya (2016), Prima dan Verawaty (2018) dan

Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018) menunjukkan bahwa ukuran pemda memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemda. Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>4</sub> : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pada pemerintah daerah**

### **2.3.5 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* Pemerintah Daerah**

Kekayaan daerah dapat memberikan cerminan terhadap suatu pengelolaan/penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana kekayaan daerah yang relatif kecil akan mencerminkan kinerja pemerintahan yang buruk, dan sebaliknya apabila kekayaan dalam suatu daerah besar maka mencerminkan adanya kinerja pemerintahan yang baik (Nosihana dan Yaya, 2016), sehingga cenderung tidak menutup-nutupi informasi keuangan pemerintah daerah. Apabila suatu pemerintah daerah memiliki kekayaan yang kecil maka akan lebih menghindari pengungkapan informasi keuangan serta membatasi akses publik dalam memperoleh informasi tersebut. PAD merupakan suatu pengukuran dalam menentukan kekayaan daerah Hendriyani dan Tahar (2015). Menurut Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018) PAD merupakan salah satu dari pendapatan yang diperoleh oleh daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya dari daerah itu sendiri.

Berdasarkan dari teori *signalling* dengan kekayaan daerah yang besar akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan atau menunjukkannya terhadap publik sebagai suatu bentuk signal yang baik bahwa pemerintah daerah



tersebut memiliki manajemen publik yang baik. Dengan melakukan pengungkapan dapat dilakukan dengan media yang mudah untuk diakses publik seperti media internet melalui *website* pemda.

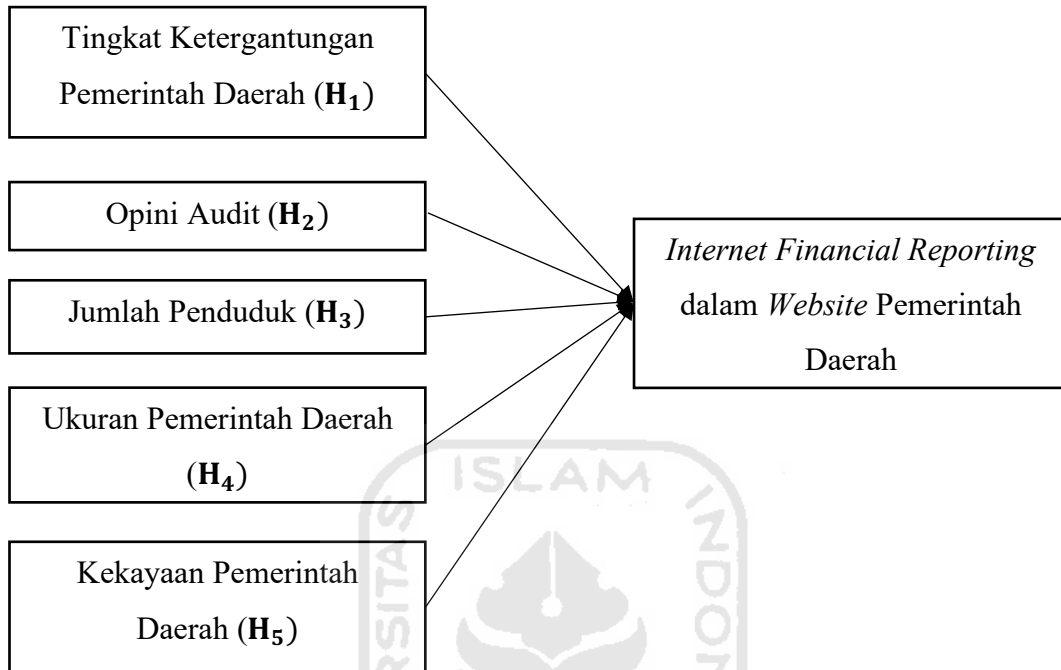
Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Sutaryo, dan Budiarmanto (2013), Trisnawati dan Achmad (2014), Hendriyani dan Tahar (2015), Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018), dan Sofyani dan Dwirama (2019) menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui internet. Dari uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>5</sub> : Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pada pemerintah daerah**

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yaitu variabel independent dan variabel dependen. Dimana variabel dependennya adalah *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ialah tingkat ketergantungan, opini audit, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di kabupaten atau kota yang ada di Indonesia tahun periode 2017-2018. Dimana seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berjumlah 514 pemerintah daerah termasuk sebanyak 415 kabupaten, 93 kota, 6 kabupaten/kota administratif. Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang ditetapkan berdasarkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Pemerintah daerah yang memiliki *website* resmi dengan domain go.id dan dapat diakses.
3. Pemerintah daerah yang tidak termasuk kabupaten atau kota administratif.
4. Pemerintah daerah yang dalam *websitenya* melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Neraca (*audited*) tahun 2017 dan/atau 2018.
5. Pemerintah daerah yang memiliki data statistik yang lengkap sesuai dengan pengukuran variabel penelitian.

## 3.2 VARIABEL PENELITIAN

### 3.3.1 Variabel Dependen

#### 3.3.1.1 Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR)

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan tingkat dari praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Tingkat dari praktik *internet financial reporting* ini adalah tingkat dari pengungkapan informasi keuangan yang dilakukan pemerintah melalui media internet. Dimana variabel ini akan diukur dengan metode indeks *scoring* praktik *internet financial reporting* pemerintah daerah. Indeks *scoring* yang digunakan berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Styles & Tennyson (2007) tentang keteraksesan *internet financial reporting* pemda yang dimodifikasi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

Data penelitian untuk variabel dependen diperoleh dengan melakukan obeservasi dari *website* pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dimana dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap informasi yang telah diungkapkan dalam *website* pemda, kemudian dilakukannya penyesuaian antara informasi yang diungkapkan dalam *website* pemda dengan indeks *scoring* yang telah ditetapkan. Diberikannya nilai sesuai skor apabila sesuai dengan syarat indeks dan skor 0 apabila tidak sesuai syarat indeks.

### 3.3.2 Variabel Independen

#### 3.3.2.1 Tingkat Ketergantungan (*DEPEND*)

Tingkat ketergantungan pemda mengindikasikan seberapa jauh pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Besarnya pendapatan yang dimiliki pemerintah daerah berasal dari dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat. Adanya kecenderungan suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan praktik *internet financial reporting* (IFR) apabila adanya tingkat ketergantungan yang tinggi oleh pemerintah daerah (Puspita dan Martani, 2012). Adanya pengawasan yang ketat dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap kinerja pemda apabila tingginya tingkat ketergantungan pemda. Tingkat ketergantungan dapat diukur dengan persentase dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan total realisasi pendapatan yang dirumuskan sebagai berikut:

$$DEPEND = \frac{\text{Dana Alokasi Umum (DAU)}}{\text{Total Realisasi Anggaran Pendapatan}}$$

#### 3.3.2.2 Opini Audit (OP)

Opini audit merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) mengenai tingkat kewajaran atas hasil kinerja pemerintah yang disajikan dalam laporan keuangan. Adanya hasil dari pemeriksaan atas laporan keuangan akan mencerminkan kualitas dari suatu kinerja pemerintahan. Opini audit dapat diperoleh dari Indeks Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2017-2018 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dimana dalam penelitian, variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu pemerintah daerah akan diberikan skor 1 apabila mendapatkan opini

WTP dan pemerintah daerah akan diberikan skor 0 apabila mendapatkan opini audit selain WTP.

### **3.3.2.3 Jumlah Penduduk (POPUL)**

Dalam sektor pemerintahan, penduduk dapat dikatakan sebagai *stakeholders*, sehingga dalam suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mengindikasikan bermacam-macamnya *stakeholders* pada lembaga pemerintah daerah, maka memiliki kebutuhan mengenai informasi yang berbeda pula dalam melakukan pengambilan keputusan serta pengawasan. Mengingat hal tersebut penduduk memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah untuk dapat melakukan transparansi. Dengan besarnya jumlah penduduk dalam suatu pemerintah daerah dapat mempengaruhi tingkat dari pengungkapan informasi keuangan pemda di internet. Variabel jumlah penduduk ini diukur berdasarkan pada *logaritma natural* dari jumlah penduduk suatu daerah (Nurhidayati dan Wahasusmiah, 2018). Data untuk jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS RI).

$$POPUL = \ln \text{Jumlah Penduduk}$$

### **3.3.2.4 Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)**

Ukuran pemerintah daerah diukur berdasarkan dari total aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah. Dimana total aset itu sendiri merupakan sumber daya yang bernilai ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Besarnya suatu aset yang dimiliki oleh pemda maka dapat menunjukkan seberapa besarnya ukuran dari pemerintah daerah itu sendiri (Nosihana dan Yaya, 2016). Pengungkapan informasi keuangan di internet merupakan bentuk dari transparansi dan akuntabilitas pemda

yang dianggap lebih efisien, sehingga biaya yang dikeluarkan akan tergantung dari ukuran pemda. Pengukuran variabel ukuran pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan *logaritma natural* atas total aset pemerintah daerah.

$$SIZE = Ln\text{Total Aset}$$

### 3.3.2.5 Kekayaan Pemerintah Daerah (*WEALTH*)

Kekayaan daerah merupakan cerminan dari suatu kinerja pemerintah daerah. Besarnya kekayaan daerah akan menunjukkan baiknya kinerja dari pemerintahan tersebut. Dimana kekayaan daerah diukur berdasarkan pada besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemda. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dimiliki oleh pemda dengan memanfaatkan potensi dari sumber daya yang dimiliki oleh pemda itu sendiri (Nosihana dan Yaya, 2016). Pengukuran pada variabel kekayaan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan persamaan dari total pendapatan asli daerah yang dibagi dengan jumlah penduduk yang dirumuskan sebagai berikut:

$$WEALTH = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

## 3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi yang dapat diperoleh melalui *website* dari masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Dalam penelitian ini, data yang digunakan data keuangan dan non-keuangan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah. Dimana data diperoleh dengan melakukan observasi secara langsung dalam

*website* resmi dari masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang dilakukan mulai pada bulan 28 Januari hingga 07 Maret 2020.

Variabel independen yang digunakan yaitu tingkat ketergantungan, kekayaan pemda yang menggunakan data ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tahun 2017-2018 yang dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Kemudian data mengenai ukuran daerah diperoleh dari neraca yang terdapat pada masing-masing *website* pemerintah daerah serta yang terdapat dalam situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Data opini audit atas LKPD diperoleh dari Indeks Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)). Data jumlah penduduk pada tahun 2017-2018 untuk kabupaten/kota di Indonesia diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

### **3.4 TEKNIK ANALISA DATA**

Dalam penelitian ini alat untuk menganalisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Dimana dalam melakukan analisis data dibantu dengan penggunaan *software* komputer berupa SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

#### **3.4.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan suatu data yang dilihat berdasarkan pada nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2018), Namun dalam



penelitian ini analisis statistik deskriptif yang dihitung hanya maksimum, minimum, *mean*, dan standar deviasi.

### **3.4.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.4.2.1 Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas dilakukan untuk menguji dalam model regresi apakah ditemukan ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadinya korelasi dari satu variabel independent dengan variabel independent lainnya (Ghozali, 2018). Apabila terdapatnya korelasi antar variabel independen maka akan munculnya masalah multikolonieritas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dimana *tolerance* mengukur variadibilitas dari variabel independen yang terpilih, dimana variabel tersebut tidak dijelaskan oleh variabel lainnya. Nilai dari *tolerance* yang rendah akan sama dengan nilai dari VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Dimana umumnya nilai *cut off* yang digunakan yaitu apabila nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan VIF  $> 10$ , maka mengindikasikan bahwa adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### **3.4.2.2 Uji Autokolerasi**

Uji autokorelasi dilakukan dalam metode regresi linear untuk menunjukkan ada atau tidaknya suatu korelasi antara kesalahan-kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan-kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hal ini sering terjadi pada data *time series*. Dalam analisis data menggunakan model

regresi, model regresi yang baik apabila regresi bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018).

Menurut Ghozali, (2018) untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi maka dapat dilakukan dengan uji Durbin–Watson (DW test) dengan membandingkan antara nilai DW dengan batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Apabila hasil pengujian menggambarkan  $du < dw < 4-du$  maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### **3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan untuk menunjukkan terjadi adanya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik apabila terjadinya homoskedastisitas yang dimana jika adanya data yang memiliki varian yang sama dan tidak terjadinya heteroskedastisitas yang dimana data memiliki varian yang berbeda (Ghozali, 2018). Salah satu uji yang dilakukan yaitu menggunakan uji grafik plot untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas.

#### **3.4.2.4 Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk menunjukkan ada atau tidaknya distribusi normal antara variabel dependen dengan variabel independen dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji normalitas yang dilakukan yaitu dengan uji *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) terhadap nilai residual atas hasil persamaan regresi. Dalam Uji K-S, apabila nilai dari *asymp. Sig. (2-tailed)*  $> 0,05$ , maka menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima karena adanya data residual yang terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai dari *asymp. Sig. (2-tailed)*  $< 0,05$  maka menunjukkan bahwa

Ho ditolak karena adanya data residual yang terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 2018).

### 3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, digunakannya analisis regresi berganda sebagai metode analisis data yang dilakukan. Analisis regresi berganda merupakan variabel dependen tergantung pada variabel dependen. Analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IIFR = \alpha + \beta_1 \text{DEPEND} + \beta_2 \text{OP} + \beta_3 \text{POPUL} + \beta_4 \text{SIZE} + \beta_5 \text{WEALTH} + e$$

**Keterangan:**

IIFR = Indeks *Internet Financial Reporting*

$\alpha$  = Konstan

B = Koefisien Regresi

DEPEND = Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah

OP = Opini Audit

POPUL = Jumlah Penduduk

SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah

WEALTH = Kekayaan Pemerintah Daerah

e = Error

### **3.4.4 Pengujian Hipotesis**

#### **3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Pengujian ini menggunakan koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dimana nilai dari  $R^2$  yaitu antara nilai nol dan satu ( $0 = R^2 = 1$ ). Dimana apabila nilai  $R^2$  semakin mendekati 0 yang berarti variabel independen tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan apabila nilai dari  $R^2$  mendekati 1, berarti semakin baik hasil untuk model regresi.

#### **3.4.4.2 Uji Parsial (*t test*)**

Uji *t* dilakukan untuk menunjukkan apakah terdapatnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% maka alpha sebesar 5%. Dalam uji *t* ini, jika nilai signifikansi uji *t* < nilai alpha 0,05, maka terdapatnya pengaruh secara individual antara variabel independen terhadap variabel dependen dan hipotesis diterima. Sedangkan jika nilai signifikan > nilai alpha 0,05, maka tidak adanya pengaruh secara individual antar variabel independen terhadap variabel dependen dan hipotesis tidak diterima.

## BAB IV

### DATA DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian telah diperoleh dari hasil dilakukannya observasi pada *website* pemda kabupaten atau kota dengan domain *go.id* periode tahun 2017-2018. Pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Dimana metode tersebut membatasi pemilihan sampel berdasarkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Pengambilan Sampel Penelitian**

No	Kriteria dari Sampel	Jumlah
1.	Pemerintah kabupaten dan/atau kota di Indonesia	514
2.	Pemerintah daerah yang <i>website</i> tidak dapat diakses dari tanggal 28 Januari – 07 Maret 2020.	(55)
	Pemerintah daerah yang tidak memiliki <i>website</i> resmi atau <i>website</i> dengan domain <i>go.id</i>	(18)
3.	Pemerintah daerah yang termasuk pada kabupaten dan kota administratif	(6)
4.	Pemerintah daerah yang tidak melaporkan Laporan Realisasi APBD dan Neraca tahun 2017 dan atau 2018 dalam <i>website</i> resmi.	(166)
5.	Pemerintah yang tidak menyediakan transparansi pengolahan anggaran daerah pada <i>website</i>	(208)
	Total	61
	2 periode (2 x 61)	122

Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan pada table diatas maka jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 514 pemda sehingga yang terpilih sesuai dengan kreteria hanya 61 pemda Kabupaten/Kota se-Indonesia yang digunakan sebagai sampel, maka jumlah data dalam penelitian ini adalah 122 data (61 x 2 tahun).

#### 4.2 STATISTIK DESKRIPTIF

Staristik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan variabel penelitian yang dilihat dari nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Dimana variabel itu sendiri yaitu, tingkat ketergantungan, opini audit, jumlah penduduk, ukuran pemda, dan kekayaan pemda. Berikut adalah hasil dari analisis statistik deskriptif dari 122 pemerintah daerah yang diteliti.

**Tabel 4.2 Hasil Analisis Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DEPEND	122	.15	.66	.4424	.09423
POPUL	122	10.76	15.13	13.3200	.86573
SIZE	122	27.54	31.41	28.9090	.73605
WEALTH	122	11.90	14.53	13.0528	.59192
IIFR	122	.13	.96	.5657	.20149

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan pada table hasil analisis statistik deskriptif di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Variabel Tingkat Ketergantungan (DEPEND) dari hasil analisis menunjukkan bahwa memiliki nilai minimum sebesar 0,15 (Kota Surabaya) dan nilai maksimum sebesar 0,66 (Kab. Pakpak Bharat).

Kemudian untuk nilai rata-rata pada variabel tingkat ketergantungan sebesar 0,4424 yang artinya rata-rata seluruh tingkat ketergantungan sebesar 0,4424 dan standar deviasi pada variabel ini sebesar 0,09423 dari total 122 data penelitian.

- b. Variabel Jumlah Penduduk (*POPUL*) merupakan hasil dari logaritma natural dari total jumlah penduduk pada masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil uji bahwa variabel jumlah penduduk memiliki nilai minimum sebesar 10,76 atau 47.183 jiwa (Kab. Pakpak Barat) dan nilai maksimum sebesar 15,13 atau 3.717.291 jiwa (Kab. Bandung). Kemudian untuk nilai rata-rata pada variabel jumlah penduduk sebesar 13,3200 yang artinya rata-rata seluruh ukuran pemda sebesar 13,3200 atau 839.744,54 jiwa dan standar deviasi sebesar 0,86573 atau 672.946,163 jiwa dari 122 data penelitian.
- c. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (*SIZE*) merupakan hasil dari natural logaritma dari total aset pada masing-masing pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil uji bahwa variabel ukuran pemda memiliki nilai minimum sebesar 27,54 (Kab. Pakpak Barat) dan nilai maksimum sebesar 31,41 (Kota Bandung), kemudian untuk nilai rata-rata pada variabel ukuran pemda sebesar 28,9090 yang artinya rata-rata seluruh ukuran pemda sebesar 28,9090 dan standar deviasi sebesar 0,73605 dari 122 data penelitian.
- d. Variabel Kekayaan Pemerintah Daerah (*WEALTH*) merupakan hasil dari logaritma natural dari total pendapatan asli daerah dibagi dengan

jumlah penduduk. Berdasarkan pada hasil uji bahwa variabel kekayaan pemda memiliki nilai minimum sebesar 11,90 atau Rp 147.306,16/Jiwa (Kab. Labuhanbatu Utara) dan nilai maksimum sebesar 14,53 atau Rp 2.050.326,77/Jiwa (Kota Magelang). Kemudian untuk nilai rata-rata pada variabel kekayaan pemda sebesar 13,0528 yang artinya rata-rata seluruh kekayaan pemda sebesar 13,0528 atau Rp 563.406,21/Jiwa dan standar deviasi sebesar 0,59192 atau Rp 392.552,8623/Jiwa dari 122 data penelitian.

- e. Variabel Indeks *Internet Financial Reporting* (IIFR) dari hasil uji menunjukkan bahwa memiliki nilai minimum sebesar 0,13 (Kab. Rembang) dan nilai maksimum sebesar 0,96 (Kab. Tanah Bumbu). Kemudian untuk nilai rata-rata pada variabel IIFR sebesar 0,5657 yang artinya rata-rata seluruh indeks adalah sebesar 0,5657 dan standar deviasi sebesar 0,20149 dari 122 data penelitian.

**Tabel 4.3 Statistik Deskriptif untuk Variabel Opini Audit**

	Frekuensi
Opini wajar tanpa pengecualian	112
Opini selain wajar tanpa pengecualian	10

Berdasarkan pada tabel 4.3 pemerintah kabupaten/kota tahun 2017-2018 yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian sebanyak 112 pemerintah daerah dan mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian sebanyak 10 pemerintah daerah, sehingga jumlah data dari penelitian ini adalah sebanyak 122.



### 4.3 ASUMSI KLASIK

#### 4.3.1 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi terjadi korelasi diantara variabel independen. Dimana model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadinya korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan  $VIF > 10$ , maka mengindikasikan bahwa adanya multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi dan sebaliknya.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
DEPEND (Tingkat Ketergantungan)	0.430	2.325	Tidak terjadi multikolonieritas
OP (Opini Audit)	0.936	1.068	Tidak terjadi multikolonieritas
POPUL (Jumlah Penduduk)	0.264	3.789	Tidak terjadi multikolonieritas
SIZE (Ukuran Pemda)	0.203	4.934	Tidak terjadi multikolonieritas
WEALTH (Kekayaan Pemda)	0.374	2.677	Tidak terjadi multikolonieritas

Sumber: Hasil olah data, 2020

Dari hasil uji multikolonieritas yang disajikan pada table 4.4 dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian yang diuji tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi karena memiliki nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau  $VIF < 10$ .

### 4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan/korelasi yang terjadi antara kesalahan pengganggu pada suatu pengamatan dalam model regresi. Apabila terjadi korelasi maka diartikan terdapat autokorelasi. Model regresi yang baik jika regresi bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tau tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW Test), apabila hasil pengujian menggambarkan  $du < dw < 4-du$  maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.380 <sup>a</sup>	.144	.108	.19035	1.971

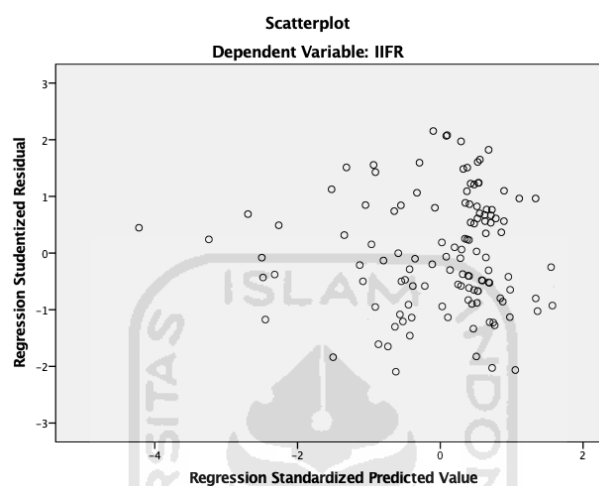
Sumber: Hasil olah data, 2020

Dapat dilihat hasil uji autokorelasi pada tabel 4.5, diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,971. Kemudian nilai pada tabel yang digunakan sebagai perbandingan dengan alpha 5% serta jumlah observasi sebanyak 122 dan variabel independent sebanyak 5 maka dapat diketahui nilai  $dL$  sebesar 1,6203 dan  $dU$  sebesar 1,7905. Dikarenakan nilai DW berada diantara  $dU = 1,7905$  dan  $(4-dU) = 2,2095$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam

model regresi. Dimana dalam uji ini model regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan cara grafik scatterplots. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplots berikut:



**Gambar 4.1 Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**

Dari grafik scatterplots diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak ke semua sisi dan tersebar secara baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **4.3.4 Uji Normalitas**

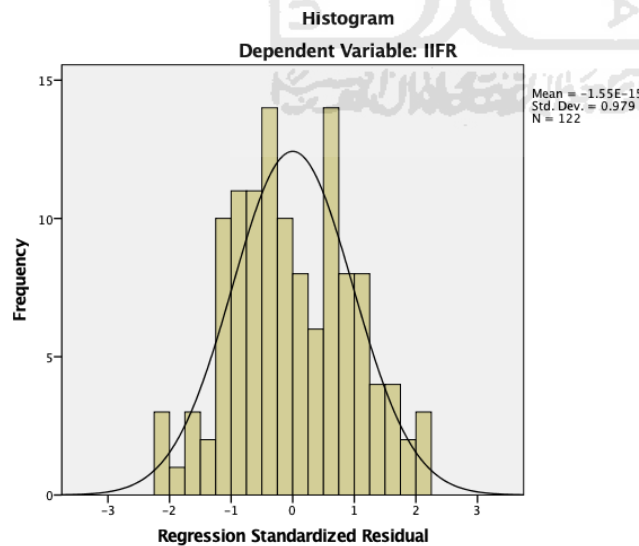
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, residual (variabel pengganggu) berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini hal tersebut diuji berdasarkan pada grafik dan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Apabila hasil uji menyajikan  $\text{asympt. Sig (2-tailed)} > 0,05$  maka data dapat dikatakan berdistribusi secara normal dan apabila pada grafik histogram

menggambarkan pola yang mendekati berbentuk lonceng dan plot linear menggambarkan data yang mengikuti garis linear diagonal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut.

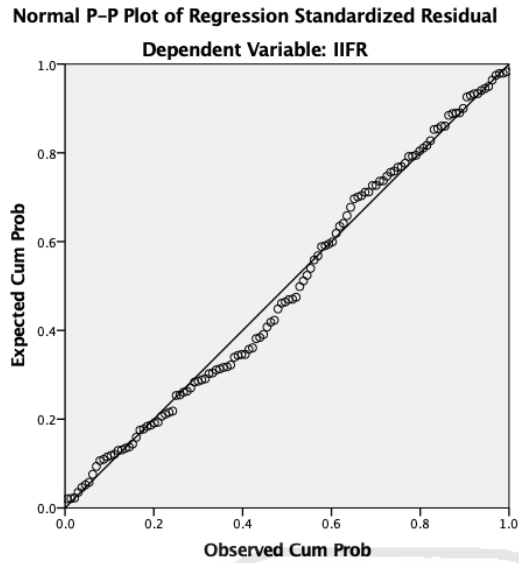
**Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18637269
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.053
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil olah data, 2020



**Gambar 4.2 Grafik Histogram dalam Uji Normalitas**



**Gambar 4.3 Grafik Plot Linear dalam Uji Normalitas**

Dari hasil uji normalitas pada one-sample kolmogorov-smirnov test menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,200 yang lebih besar dari  $\alpha$  0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Kemudian dilihat berdasarkan pada grafik histogram menunjukkan bahwa pola distribusi yang mendekati bentuk lonceng dan pada grafik plot menunjukkan bahwa titik-titik tidak menyebarkan dari garis diagonal atau bergerak sedikit lurus mengikuti garis diagonal.

#### **4.4 ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA**

Model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari variabel tingkat ketergantungan, opini audit, jumlah penduduk, ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap praktik *internet financial reporting* (IFR) dalam

*website* pemerintah daerah. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.662	1.153		.575	.567
DEPEND	-.294	.280	-.137	-1.049	.297
OP	.157	.065	.214	2.411	.017
POPUL	.069	.039	.296	1.771	.079
SIZE	-.038	.052	-.140	-.733	.465
WEALTH	.006	.048	.018	.125	.901

a. Dependent Variable: IIFR

Sumber: Hasil olah data, 2020

Dari hasil analisis regresi berganda pada table 4.7, model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{IIFR} = 0,662 - 0,294\text{DEPEND} + 0,157\text{OP} + 0,069\text{LnPOPUL} - 0,038\text{LnSIZE} + 0,006\text{LnWEALTH} + e$$

Berdasarkan pada persamaan diatas dapat menunjukkan kesimpulan terhadap hubungan antar variabel independen dan dependen sebagai berikut:

- a. Nilai konstan sebesar 0,662 menunjukkan bahwa, jika variabel bebas atau variabel independen bernilai 0, maka nilai dari *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah adalah sebesar 0,662.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat ketergantungan yaitu negatif sebesar 0,294 yang berarti menunjukkan bahwa setiap peningkatan tingkat ketergantungan sebesar 1 (satu) akan diikuti

dengan meningkatnya praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah sebesar 0,294 dengan asumsi seluruh variabel independen dalam kondisi konstan.

- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel opini audit yaitu positif sebesar 0,157 yang berarti menunjukkan bahwa setiap peningkatan opini audit sebesar 1 (satu) akan diikuti dengan meningkatnya praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah sebesar 0,157 dengan asumsi seluruh variabel independen dalam kondisi konstan.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel jumlah penduduk yaitu positif sebesar 0,069 yang berarti menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 (satu) akan diikuti dengan meningkatnya praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah sebesar 0,069 dengan asumsi seluruh variabel independen dalam kondisi konstan.
- e. Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran pemda yaitu negatif sebesar 0,038 yang berarti menunjukkan bahwa setiap peningkatan ukuran pemda sebesar 1 (satu) diikuti dengan meningkatnya praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah sebesar 0,038 dengan asumsi seluruh variabel independen dalam kondisi konstan.
- f. Nilai koefisien regresi untuk variabel kekayaan pemda yaitu positif sebesar 0,006 yang berarti menunjukkan bahwa setiap peningkatan kekayaan pemda sebesar 1 (satu) akan diikuti dengan meningkatnya

praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah sebesar 0,006 dengan asumsi seluruh variabel independen dalam kondisi konstan.

## 4.5 PENGUJIAN HIPOTESIS

### 4.5.1 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel-variabel independen lainnya. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi.

**Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.380 <sup>a</sup>	.144	.108

Sumber: Hasil olah data, 2020

Berdasarkan pada hasil uji besarnya adjusted R square yang dihasilkan adalah sebesar 0,108 (10,8%). Dari hasil nilai adjusted R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa variasi dari praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah hanya sebesar 10,8% yang dapat dijelaskan oleh variabel independen maka 89,2% yang tersisa terdapat faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah atau dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.



#### 4.5.2 Uji Parsial (*t test*)

Pengujian terhadap uji *t* dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial dalam penelitian ini. Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS diketahui bahwa hasil *t test* adalah sebagai berikut:

a. Hasil hipotesis pertama ( $H_1$ )

Hipotesis pertama dalam penelitian ini ialah tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan memiliki nilai *t* hitung -1,049 dan sig 0,297 >  $\alpha$  0,05. Nilai koefisien regresi bernilai negatif dari variabel tingkat ketergantungan yaitu sebesar -0.294. maka dapat disimpulkan  $H_1$  tidak didukung. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

b. Hasil hipotesis kedua ( $H_2$ )

Hipotesis kedua dalam penelitian ini ialah opini audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa opini audit memiliki nilai *t* hitung 2,411 dan sig 0.017 <  $\alpha$  0,05. Nilai koefisien regresi bernilai positif dari variabel opini audit yaitu sebesar 0.157 maka dapat disimpulkan  $H_2$  didukung. Hal

tersebut menggambarkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

c. Hasil hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>)

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini ialah jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai t hitung 1.771 dan sig 0.079 >  $\alpha$  0,05. Nilai koefisien regresi bernilai positif dari variabel jumlah penduduk yaitu sebesar 0.069 maka dapat disimpulkan H<sub>3</sub> tidak didukung. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

d. Hasil hipotesis keempat (H<sub>4</sub>)

Hipotesis keempat dalam penelitian ini ialah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa ukuran pemda memiliki nilai t hitung -0.733 dan sig 0.465 >  $\alpha$  0,05. Nilai koefisien regresi bernilai negatif dari variabel ukuran pemda yaitu sebesar -0.038 maka dapat disimpulkan H<sub>4</sub> tidak didukung. Hal tersebut menggambarkan bahwa ukuran pemda tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

e. Hasil hipotesis kelima ( $H_5$ )

Hipotesis kelima dalam penelitian ini ialah kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa kekayaan pemda memiliki nilai t hitung 0,125 dan sig 0,901 >  $\alpha$  0,05. Nilai koefisien regresi bernilai positif dari variabel kekayaan pemda yaitu sebesar 0.006 maka dapat disimpulkan  $H_5$  tidak didukung. Hal tersebut menggambarkan bahwa kekayaan pemda tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

#### 4.6 PEMBAHASAN

##### 4.6.1 Tingkat Ketergantungan Berpengaruh Positif Terhadap *Internet Financial Reporting* (IFR) dalam *Website* pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien tingkat ketergantungan ialah sebesar -0,294 dan untuk nilai signifikansi sebesar 0,297 sedangkan nilai alpha 5% maka hasilnya adalah Sig. > alpha. Dalam penelitian ini hasil hipotesis yang diharapkan atau hipotesis  $H_1$  yaitu tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah. Namun demikian, dari hasil pengujian yang dilakukan secara statistik menyatakan bahwa hipotesis  $H_1$  **tidak didukung** atau tingkat ketergantungan tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Sehingga, besaran dari suatu dana alokasi umum (DAU) yang diterima pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh bagi

pemerintah untuk melakukan atau meningkatkan praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan pada teori keagenan, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah selaku *agent* selain memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat juga perlu adanya pertanggungjawaban pada pihak pusat hal ini dikarena pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemda dalam mengelola keuangan daerah untuk menyeimbangkan keuangan melalui dana perimbangan (Nurhidayati dan Wahasusmiah, 2018). Hal ini serupa dengan teori *signalling*, dimana dengan tingginya tingkat ketergantungan maka akan memberikan signal yang baik kepada masyarakat maupun pemerintah pusat untuk menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah telah menjalankannya dengan sebagaimana mestinya serta sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya terhadap pemerintah pusat. Namun demikian, hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa besaran dari suatu tingkat ketergantungan yang diterima pemerintah daerah tidak berpengaruh pada keinginan pemerintah untuk melakukan praktik *internet financial reporting*. Hal tersebut dapat diduga dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap penggunaan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan pengungkapan informasi melalui situs resmi pada masing-masing pemda (Setyaningrum & Syafitri, 2012).

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012), Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018), Hilmi dan

Martani (2012), Hendriyani dan Tahar (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tidak memberikan pengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah.

#### **4.6.2 Opini Audit Berpengaruh Positif Terhadap *Internet Financial***

##### ***Reporting dalam Website Pada Pemerintah Daerah***

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien opini audit ialah sebesar 0,157 dan untuk nilai signifikansi sebesar 0,017 sedangkan nilai alpha 5% maka hasilnya adalah Sig. < alpha. Dalam penelitian ini hasil hipotesis yang diharapkan atau hipotesis H<sub>2</sub> yaitu opini audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah. Namun demikian, dari hasil pengujian yang dilakukan secara statistik menyatakan bahwa hipotesis H<sub>2</sub> **didukung** atau opini audit berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Sehingga, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian memberikan pengaruh terhadap pemerintah daerah untuk melakukan praktik *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan pada teori keagenan, BPK RI selaku auditor dapat berperan penting dalam mengurangi adanya *agency problem* dikarenakan dengan adanya opini yang diberikan akan mendorong pemda dalam memberikan informasi terbuka pada publik sehingga tidak adanya ketidakseimbangan informasi keuangan. Pada teori *signalling*, apabila opini WTP yang diterima oleh pemda maka akan mendorong pemda untuk menunjukkan signal yang baik kepada publik atas baiknya penyelenggaraan pengelolaan keuangan serta akan melakukan pelaporan keuangan

di internet melalui *website* pemda. Pemerintah daerah yang mendapatkan hasil opini audit WTP berarti memiliki pelaporan dan pelaksanaan keuangan yang baik serta menjadikan signal positif bagi masyarakat atas pemerintahan yang dijalankan, sehingga pemerintah cenderung tidak menutup-nutupi informasi-informasi pelaksanaan keuangan yang dijalankan dan informasi keuangan akan lebih banyak dipublikasikan melalui *website* (Rahim dan Martani, 2016).

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahim dan Martani (2016) dan Sofyani dan Dwirama (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah.

#### **4.6.3 Jumlah Penduduk Berpengaruh Positif Terhadap *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pada Pemerintah Daerah**

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien jumlah penduduk ialah sebesar 0,069 dan untuk nilai signifikansi sebesar 0,079 sedangkan nilai alpha 5% maka hasilnya adalah Sig. > alpha. Dalam penelitian ini hasil hipotesis yang diharapkan atau hipotesis H<sub>3</sub> yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah. Namun demikian, dari hasil pengujian secara statistik menyatakan bahwa hipotesis H<sub>3</sub> **tidak didukung** atau jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemerintah daerah. Sehingga, dengan banyak tidaknya jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh atau dorongan pada pemerintah daerah untuk melakukan praktik IFR.

Berdasarkan pada teori keagenan dengan jumlah penduduk yang besar akan menunjukkan bahwa adanya asimetri informasi yang besar pula antara *principal* dan *agent*, serta akan lebih besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan *agent* dalam menyampaikan laporan keuangan kepada *principal* (*bonding cost*). Namun demikian, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa dengan besarnya jumlah penduduk tidak terbukti dapat mendorong pemda dalam melakukan publikasi informasi keuangan dalam *website*. Hal ini dapat dikarenakan dengan banyaknya jumlah penduduk namun apabila tidak memiliki daya pikir yang baik dan kritis terhadap kinerja pemerintah maka permintaan atas transparansi terhadap laporan keuangan akan rendah (Nurhidayati dan Wahasusmiah, 2018). Jadi yang diperlukan adalah kulaitas dari penduduk apabila penduduk memiliki daya pikir yang bagus serta kritis maka akan munculnya permintaan ataupun tekanan yang kuat atas transparansi terhadap laporan keuangan.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati dan Wahasusmiah (2018), Alhajjriana, Nor, dan Wijaya (2017), dan Verawaty (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak memberikan pengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah.

#### **4.6.4 Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pada Pemerintah Daerah**

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien ukuran pemda ialah sebesar -0,038 dan untuk nilai signifikansi sebesar 0,465 sedangkan nilai alpha 5% maka hasilnya adalah Sig. > alpha. Dalam

penelitian ini hasil hipotesis yang diharapkan atau hipotesis H<sub>4</sub> yaitu ukuran pemda berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah. Namun demikian, hasil dari pengujian secara statistik menyatakan bahwa hipotesis H<sub>4</sub> **tidak didukung** atau ukuran pemda tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemda. Sehingga, dengan besaran dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh atau dorongan pada pemerintah daerah untuk melakukan praktik IFR.

Berdasarkan teori agensi, dengan ukuran pemerintahan yang besar maka diperlukanya pengawasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat. Sehingga perlunya menyajikan laporan keuangan melalui internet dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan *agent* (*bonding cost*). Namun demikian, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa besaran dari total aset tidak terbukti mendorong pemda dalam melakukan publikasi informasi keuangan dalam *website*. Hal ini bisa saja terjadi dapat dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dimana dapat terjadi penyelewengan dana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah serta dengan total aset yang besar cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang kompleks sehingga kualitas pengelolaan aset yang kurang baik dan memperoleh catatan dari badan pemeriksaan keuangan (BPK) (Hilmi dan Martani, 2012). Sehingga, pemerintah daerah tidak terdorong untuk melakukan praktik *internet financial reporting* melalui *website* pemda.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyaningrum & Syafitri (2012), Rahman, Sutaryo, dan Budiatmanto (2013),



Afryansyah dan Haryanto (2013) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah.

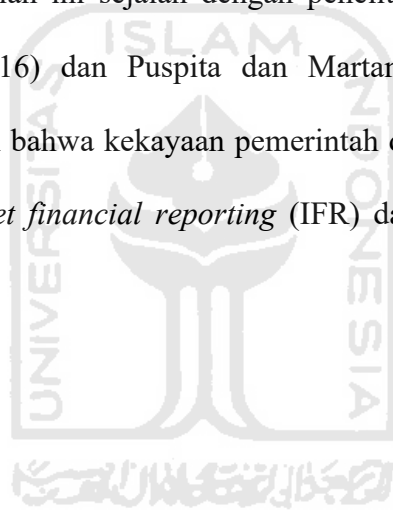
#### **4.6.5 Kekayaan Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap *Internet Financial Reporting* dalam *Website* Pada Pemerintah Daerah**

Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien kekayaan pemda ialah sebesar 0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,901 sedangkan nilai alpha 5% maka hasilnya adalah Sig. > alpha. Dalam penelitian ini hasil hipotesis yang diharapkan atau hipotesis H<sub>5</sub> yaitu kekayaan pemda berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pada pemerintah daerah. Namun demikian, hasil dari pengujian secara statistik menyatakan bahwa hipotesis H<sub>5</sub> **tidak didukung** atau kekayaan pemda tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* dalam *website* pemda. Dalam penelitian ini kekayaan daerah dinyatakan dengan pendapatan asli daerah (PAD) maka dengan besaran dari pendapatan asli daerah tidak memberikan pengaruh atau dorongan pada pemerintah daerah untuk melakukan praktik IFR.

Berdasarkan dari teori *signalling* dengan kekayaan daerah yang besar akan mendorong pemerintah untuk melakukan pengungkapan atau menunjukkannya terhadap publik sebagai suatu bentuk signal yang baik bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki manajemen publik yang baik. Dengan melakukan pengungkapan dapat dilakukan dengan media yang mudah untuk diakses publik seperti media internet melalui *website* pemda. Namun demikian, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak terbukti berpengaruh terhadap pemda

dalam melakukan publikasi informasi keuangan dalam *website*. kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari pendapatan asli daerah. Hal ini diduga dengan jumlah pendapatan yang tinggi tidak secara otomatis akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan informasi keuangan. Jadi apabila suatu pemerintah daerah memiliki pendapatan yang besar tidak secara langsung memberikan dampak bahwa masyarakat juga membutuhkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah melalui *website* (Nosihana dan Yaya, 2016).

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nosihana dan Yaya (2016) dan Puspita dan Martani (2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pengujian statistik dan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tingkat ketergantungan (DEPEND) tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan yang diukur berdasarkan besaran dari dana alokasi umum yang dibagi dengan realisasi anggaran pendapatan bukan faktor yang dapat mempengaruhi IFR dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini diduga akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat atas dana alokasi umum yang diberikan kepada pemda, sehingga pemda cenderung untuk tidak melakukan praktik *internet financial reporting* melalui *website*.
- b. Opini audit (OP) berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit ialah salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh pada praktik IFR dalam *website* pemerintah daerah. Opini audit yang diberikan oleh BPK RI wajar tanpa pengecualian akan menunjukkan kinerja pemerintah yang lebih baik sehingga pemerintah cenderung akan melakukan pengungkapan informasi keuangan melalui *website* pemda.

- c. Jumlah penduduk (POPUL) tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang diukur berdasarkan besar atau kecil jumlah populasi dari masing-masing pemerintah kabupaten atau kota bukan merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada praktik IFR dalam *website* pemda. Hal ini diduga kuantitas penduduk tidak menjamin untuk pemerintah melakukan praktik IFR melalui *website*.
- d. Ukuran pemerintah daerah (*SIZE*) tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diukur berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah bukan merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh pada praktik IFR dalam *website* pemda. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah aset yang besar cenderung memiliki kualitas pengolahan aset yang kurang baik dan memperoleh catatan dari BPK sehingga dengan kondisi tersebut memungkinkan pemerintah untuk tidak melakukan praktik IFR melalui *website*.
- e. Kekayaan pemerintah daerah (*WEALTH*) tidak berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting* (IFR) dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan pemda yang diukur berdasarkan pada pendapatan asli daerah dibagi jumlah penduduk bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi IFR dalam *website*

pemerintah daerah. Pemda yang memiliki pendapatan yang besar tidak secara langsung memberikan dampak bahwa masyarakat membutuhkan informasi keuangan yang dapat dipublikasikan melalui *website* pemda.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan pada pembahasan serta kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pemerintah bahwa perlunya pembentukan regulasi mengenai pengungkapan informasi keuangan dalam *website* pemda. Dengan adanya regulasi yang kuat dapat memotivasi pemda maupun badan publik lainnya untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat dilakukan melalui *website* masing-masing pemda.
- b. Dalam penelitian ini opini audit menggunakan variabel dummy yang dapat diganti menggunakan skala poin dimana dari tingkatan pada poin dikasifikasikan berdasarkan pada kualitas dari opini tersebut.
- c. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan checklist terhadap item-item baru mengenai pelaporan informasi keuangan melalui *website* pemda yang dapat berupa item-item yang terdapat dalam PSAP serta item-item mengenai ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan melalui situs resmi.
- d. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian dengan menggunakan atau menambahkan variabel-variabel baru yang dapat menjelaskan pengaruh terhadap *internet financial reporting* (IFR)

dalam *website* penda serta dapat menambahkan jumlah sampel seperti menggunakan pemerintah daerah tingkat provinsi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afryansyah, R. D., dan Haryanto. (2013). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah”. *Diponegoro Journal of Accounting* 2(3): 1–11.
- Alhajjriana, G. I., Nor, W., dan Wijaya, R. (2017). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Internet Financial Reporting* Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah”. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 17(2): 100–109.
- Alwi, Kholida., dan Bachtiar, E. (2014). “Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK dan Faktor Politik Terhadap Tingkat Transparansi Keuangan dan Kinerja Di Website Pemerintah Daerah di Indonesia” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Depok: Universitas Indonesia.
- Anthony, R. N., dan Govindarajan, V. (2011). “Sistem Pengendalian Manajemen”. Tangerang Selatan: Kharisma
- Evans, J., dan Patton, J. (1987). “*Signalling and Monitoring in Public Sector Accounting*” *Journal of Accounting Research* 25 (Supplement), 130–158.
- García, A. C., dan García-garcía, J. (2010). “*Determinants of Online Reporting of Accounting Information by Spanish Local Government Authorities*”. *Local Government Studies*, 36(5): 679–695.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Government Finance Officers Assosiation*. (2009). GFOA. Chicago.
- Hanifah, F. F., dan Kiswanto. (2017). “*The Effect of Political Competition, HDI, and Leverage on The Availabiliti and Accesssibility of Local Financial Information on The Website*” *Accounting Analysis Journal* 6(2):242-252.
- Hendriyani, Ririn., dan Afrizal Tahar. (2015). “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 22(1): 25-33.
- Hilmi, A. Z., dan Martani, Dwi. (2012). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

- Provinsi”. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1-26, September 2012.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics* 3(4): 303-360.
- Jatmiko, I., dan Kumara, A. F. (2015). “Key Success Factors for Web-Based Financial Statements Disclosure to Create Local Government Transparency in Indonesia (Empirical Study on Local Government in Indonesia)”. *Australian Journal of basic and Applied Sciences* 9(27):663-669.
- Kholifah, D. W. (2019). “Determinan Praktik Internet Financial Reporting (IFR) Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2016-2017)”. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Khudri, TB. M. Y., Martani, Dwi., & Maulana, T. I. (2015). “Quality Analysis of Local Government Websites in Indonesia”. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 71(1) :107-114
- Laswad, F., Fisher, R., dan Oyelere, P. (2005). “Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities”. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Medina, Febri. (2012). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia”. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nosihana, A., dan Yaya, R. (2016). “Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 3(2):87-101.
- Nurhidayati, Siti., dan Rolia, Wahasusmiah. (2018). “Pengaruh Kinerja Keuangan, Karakteristik Pemda dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Di Internet”. *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Global Competitive Advantage*, 25, September 2018.



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Perez, C. C., Bolivar, M. P. R., & Hernández, A. M. L. (2008). “*E-Government Process and Incentives for Online Public Financial Information*”. *Online Information Review*. 71(2), pp. 176-194.
- Prima, Windiyah., dan Verawaty. (2018). “Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *E-Government* Di Sumatera Bagian Selatan”. *Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Global Competitive Advantage*, 25, September 2018.
- Puspita, R., dan Martani, D. (2012). “Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam *Website* Pemda”. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 1–25, September 2012.
- Rahim, W. M., dan Martani, D. (2016). “Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan *Website* Pemerintah Daerah” *Konferensi Regional Akuntansi III, Jember*, April 2016.
- Rahman, A., Sutaryo, dan Budiartanto, A. (2013). “Determinan *Internet Financial Local Government Reporting* di Indonesia”. *Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado*, 25–28, September 2013.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.
- Robbins, W. A., dan Austin, K. R. (1987). “*Disclosure Quality In Governmental Financial Reports: an Assessment of The Appropriateness of A Compound Measure*” *Journal of Accounting Research* 24, 412-421.

- Rosita, L. R. A., dan Arifin, J. (2017). “Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam *Website* Pemerintah Daerah”. *Simposium Nasional Akuntansi XX Jember*, 1–26, September 2017.
- Sofyani, Hafiez., dan Vicky Dwirama. (2019). “Determinan Praktik *Internet Reporting* Oleh Pemerintah Daerah Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, XVII (2): 158-168.
- Setyaningrum, Dyah., dan Febriyani, S. (2012). “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat pengungkapan Laporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi dan keuangan Indonesia* 9(2): 154-170.
- Styles, A. K., dan Tennyson, M. (2007). “*The Accessibility of Financial Reporting of U.S. Municipalities on The Internet*”. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1): 56–92.
- Suwardjono. (2014). “Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan”. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Transparency International, (2020). *Corruption Perceptions Index 2017-2018*. (Diakses tanggal 27 Januari 2020) <https://www.apjii.or.id>
- Trisnawati, M. D., dan Achmad, K. (2014). “Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet”. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok. 24-27 September 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Verawaty. (2015). “Determinan Aksesibilitas *Internet Financial Reporting* Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia”. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*, September 2015.
- Verawaty. (2017). “Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E-Government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan”. *Journal of Accounting & Finance*, 13(2): 92-107.
- Yustikasari, Yulia. (2018). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Pada *Website*

- Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se-Indonesia)”. *Jurnal Profita*, 11(1): 34-52.
- Wau, I., dan Ratmono. (2015). “Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Ketersediaan Dan Keteraksesan *Internet Financial Reporting* Oleh Pemerintah Daerah”. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4): 1-12.
- Wulandari, A. N. (2018). “Pengaruh Karakteristik Daerah, Temuan, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada *Website Pemda Di Indonesia*)”. *Akuntansi Dewantara*, 2(1): 69-82.



## LAMPIRAN 1

Indeks *scoring* yang digunakan berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Styles & Tennyson (2007) tentang keteraksesan *internet financial reporting* Pemda dan dimodifikasi dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

### Indeks Scoring Praktik *Internet Financial Reporting* (IFR)

Poin	Syarat	score	
		2017	2018
A	Jika dapat ditemukannya <i>website</i> resmi Pemerintah dalam halaman pertama hasil pencarian <i>google</i> dengan mengetik nama pemerintah daerah		+1
B	Jika dalam <i>website</i> resmi pemerintah daerah memiliki <i>link</i> data informasi keuangan seperti <i>highlight</i> , LKPD atau APBD pada halaman depan ( <i>home</i> ) <i>website</i>	+1	+1
C	Jika terdapat <i>search engine</i> yang dapat melakukan pencarian informasi keuangan	+1	+1
D	Jika mendapatkan informasi keuangan dengan kurang dari atau sama dengan tiga kali klik dalam <i>website</i> pemerintah daerah	+1	+1
E	Jika data <i>Internet Financial Reporting</i> (IFR) dapat diunduh dalam format PDF, HTML, EXCEL, atau JPG.	+1	+1
F	Jika pada <i>website</i> pemerintah daerah terdapat data LKPD tahun sebelumnya (Periode Tahun 2016-2017)	+1	+1
G	Jika terdapat informasi <i>contact person</i> atau <i>FAQ</i> seperti telepon, fax, email atau situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		+1
H	Jika terdapat komponen mengenai Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) sesuai dengan Instruksi Mendagri No 188.52/1797/SJ/2012		
	a. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	+1	+1
	b. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD)	+1	+1
	c. Rancangan Perda APBD	+1	+1

d. Rancangan Perda Perubahan APBD	+1	+1
e. Perda APBD	+1	+1
f. Perda Perubahan APBD	+1	+1
g. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	+1	+1
h. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD	+1	+1
i. Laporan Realisasi Anggaran SKPD	+1	+1
j. Laporan Realisasi Anggaran PPKD	+1	+1
k. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK RI		
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	+1	+1
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	+1	+1
3. Neraca	+1	+1
4. Laporan Operasional (LO)	+1	+1
5. Laporan Arus Kas (LAK)	+1	+1
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	+1	+1
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	+1	+1
l. Opini BPK RI	+1	+1
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>25</b>

Sumber: Styles and Tennyson (2007), dengan modifikasi

LAMPIRAN 2

SKORING PRAKTIK *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (IFR) DALAM *WEBSITE* PEMDA

No	Nama Pemerintah Daerah	A	B		C		D		E		F		G
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	
<b>NAD</b>													
1	Kab. Aceh Barat	1			1	1			1	1	1	1	1
2	Kota Banda Aceh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>SUMATERA UTARA</b>													
3	Kab. Tapanuli Selatan	1			1	1	1	1	1	1		1	1
4	Kab. Pakpak Bharat	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
5	Padang Lawas	1			1	1	1	1	1	1			1
6	Labuhanbatu Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
<b>SUMATERA BARAT</b>													
7	Kab. Padang Pariaman	1	1	1			1	1	1	1		1	1
8	Kab. Lima Puluh Kota	1			1	1			1	1	1	1	1
9	Kab. DHARMASRAYA	1	1	1			1	1	1	1	1	1	
<b>RIAU</b>													
10	Kota Pekanbaru	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>BENGKULU</b>													

11	Kab. Bengkulu Utara	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>												
12	Kota Tanjung Pinang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>JAWA BARAT</b>												
13	Kab. Bandung	1			1	1	1	1	1	1			1
14	Kota Bogor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
15	Kota Bandung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>JAWA TENGAH</b>												
16	Kab. Banjarnegara	1			1	1	1	1	1	1		1	1
17	Kab. Banyumas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Kab. Blora	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
19	Kab. Cilacap	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
20	Kab. Jepara	1	1	1	1	1			1	1		1	1
21	Kab. Kebumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Kab. Klaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Kab. Kudus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Kab. Magelang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Kab. Pati	1	1		1		1	1	1	1			1
26	Kab. Pekalongan	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1
27	Kab. Purbalingga	1	1	1	1	1			1	1		1	1
28	Kab. Purworejo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Kab. Rembang	1	1	1	1	1	1	1		1			1

30	Kab. Sragen	1	1	1			1	1	1	1			1	
31	Kab. Sukoharjo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
32	Kab. Temanggung	1	1	1			1		1	1	1	1	1	
33	Kab. Wonogiri	1	1	1			1	1	1	1			1	
34	Kab. Wonosobo	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
35	Kota Semarang	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
36	Kota Surakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
37	Kota Magelang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
38	Kota Tegal	1	1	1			1	1	1	1		1	1	
<b>DI YOGYAKARTA</b>														
39	Kab. Bantul	1	1	1	1	1			1	1	1		1	1
40	Kab. Sleman	1	1	1			1	1	1	1			1	1
<b>JAWA TIMUR</b>														
41	Kab. Blitar	1			1	1			1	1	1	1	1	1
42	Kab. Banyuwangi	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1
43	Kab. Bojonegoro	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1
44	Kab. Pamekasan	1	1	1			1		1	1	1	1	1	1
45	Kab. Ponorogo	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	Kab. Trenggalek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Kota Madiun	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	Kota Malang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	Kota Surabaya	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	



	<b>BALI</b>												
50	Kab. Karangasem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>												
51	Kab. Lombok Tengah	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
52	Kab. Sumbawa Barat	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1
53	Kota Bima	1	1	1	1	1			1	1			1
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>												
54	Kab. Tanah Bumbu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
55	Kota Banjarbaru	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
56	Kab. Banjarmasin	1	1	1	1	1	1	1				1	1
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>												
57	Kota Balikpapan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
58	Kota Bontang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>SULAWESI SELATAN</b>												
59	Kab. Gowa	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
60	Kota Pare-Pare	1			1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>GORONTALO</b>												
61	Kab. Gorontalo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1







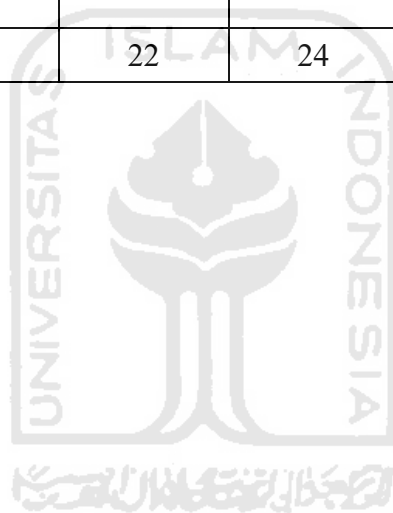


**JUMLAH SKORING INDEKS *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (Lanjutan)**

No	Nama Pemerintah Daerah	Total Skor 2017	Total Skor 2018	Indeks 2017	Indeks 2018
	<b>NAD</b>				
1	Kab. Aceh Barat	12	5	0,52	0,20
2	Kota Banda Aceh	18	16	0,78	0,64
	<b>SUMATERA UTARA</b>				
3	Kab. Tapanuli Selatan	10	8	0,43	0,32
4	Kab. Pakpak Bharat	11	8	0,48	0,32
5	Padang Lawas	4	9	0,17	0,36
6	Labuhanbatu Utara	15	12	0,65	0,48
	<b>SUMATERA BARAT</b>				
7	Kab. Padang Pariaman	12	8	0,52	0,32
8	Kab. Lima Puluh Kota	6	11	0,26	0,44
9	Kab. DHARMASRAYA	11	5	0,48	0,20
	<b>RIAU</b>				
10	Kota Pekanbaru	11	13	0,48	0,52
	<b>BENGKULU</b>				
11	Kab. Bengkulu Utara	7	9	0,30	0,36
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>				
12	Kota Tanjung Pinang	11	8	0,48	0,32
	<b>JAWA BARAT</b>				
13	Kab. Bandung	11	13	0,48	0,52
14	Kota Bogor	12	6	0,52	0,24
15	Kota Bandung	17	12	0,74	0,48
	<b>JAWA TENGAH</b>				
16	Kab. Banjarnegara	10	13	0,43	0,52
17	Kab. Banyumas	17	21	0,74	0,84
18	Kab. Blora	17	21	0,74	0,84
19	Kab. Cilacap	6	14	0,26	0,56
20	Kab. Jepara	11	11	0,48	0,44
21	Kab. Kebumen	17	19	0,74	0,76
22	Kab. Klaten	15	21	0,65	0,84
23	Kab. Kudus	21	23	0,91	0,92

24	Kab. Magelang	17	19	0,74	0,76
25	Kab. Pati	12	12	0,52	0,48
26	Kab. Pekalongan	22	18	0,96	0,72
27	Kab. Purbalingga	9	17	0,39	0,68
28	Kab. Purworejo	19	16	0,83	0,64
29	Kab. Rembang	3	12	0,13	0,48
30	Kab. Sragen	8	16	0,35	0,64
31	Kab. Sukoharjo	11	22	0,48	0,88
32	Kab. Temanggung	19	19	0,83	0,76
33	Kab. Wonogiri	16	20	0,70	0,80
34	Kab. Wonosobo	16	19	0,70	0,76
35	Kota Semarang	17	10	0,74	0,40
36	Kota Surakarta	12	21	0,52	0,84
37	Kota Magelang	17	13	0,74	0,52
38	Kota Tegal	7	17	0,30	0,68
	<b>DI YOGYAKARTA</b>				
39	Bantul	12	14	0,52	0,56
40	Sleman	10	13	0,43	0,52
	<b>JAWA TIMUR</b>				
41	Kab. Blitar	11	18	0,48	0,72
42	Kab. Banyuwangi	16	18	0,70	0,72
43	Kab. Bojonegoro	19	21	0,83	0,84
44	Kab. Pamekasan	14	13	0,61	0,52
45	Kab. Ponorogo	6	15	0,26	0,60
46	Kab. Trenggalek	20	24	0,87	0,96
47	Kota Madiun	12	8	0,52	0,32
48	Kota Malang	13	16	0,57	0,64
49	Kota Surabaya	12	16	0,52	0,64
	<b>BALI</b>				
50	Kab. Karangasem	12	14	0,52	0,56
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>				
51	Kab. Lombok Tengah	12	11	0,52	0,44
52	Kab. Sumbawa Barat	10	7	0,43	0,28

53	Kota Bima	3	11	0,13	0,44
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>				
54	Kab. Tanah Bumbu	22	15	0,96	0,60
55	Kota Banjarbaru	17	11	0,74	0,44
56	Kab. Banjarmasin	9	9	0,39	0,36
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>				
57	Kota Balikpapan	9	19	0,39	0,76
58	Kota Bontang	16	15	0,70	0,60
	<b>SULAWESI SELATAN</b>				
59	Kab. Gowa	11	15	0,48	0,60
60	Kota Pare-Pare	9	9	0,39	0,36
	<b>GORONTALO</b>				
61	Kab. Gorontalo	22	24	0,96	0,96





**LAMPIRAN 3**

**VARIABEL TINGKAT KETERGANTUNGAN (*DEPEND*)**

No	Nama Pemerintah Daerah	2017			2018		
		Dana Alokasi Umum (Rp)	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Depend	Dana Alokasi Umum (Rp)	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Depend
<b>NAD</b>							
1	Kab. Aceh Barat	570.327.086.000,00	1.364.767.898.288,08	0,42	570.763.544.000,00	1.250.681.695.137,00	0,46
2	Kota Banda Aceh	591.771.772.000,00	1.244.415.059.118,86	0,48	591.711.772.000,00	1.135.914.599.522,00	0,52
<b>SUMATERA UTARA</b>							
3	Kab. Tapanuli Selatan	644.304.467.000,00	1.246.916.483.230,00	0,52	642.196.018.670,00	1.368.913.574.362,00	0,47
4	Kab. Pakpak Bharat	338.611.130.000,00	512.671.276.741,00	0,66	339.271.690.000,00	535.364.896.438,00	0,63
5	Kab. Padang Lawas	520.970.737.000,00	1.023.852.818.104,00	0,51	521.562.942.000,00	1.029.402.278.210,00	0,51
6	Kab. Labuhanbatu Utara	588.021.836.000,00	1.050.277.014.266,00	0,56	588.021.836.000,00	1.033.343.832.203,00	0,57
<b>SUMATERA BARAT</b>							
7	Kab. Padang Pariaman	769.827.010.000,00	1.388.638.247.011,00	0,55	769.827.010.000,00	1.309.985.762.673,00	0,59
8	Kab. Lima Puluh Kota	747.892.916.000,00	1.275.862.309.268,00	0,59	747.073.168.000,00	1.257.168.413.662,00	0,59
9	Kab. DHARMASRAYA	501.682.277.000,00	949.023.480.858,55	0,53	501.889.284.000,00	923.540.952.022,00	0,54
<b>RIAU</b>							
10	Kota Pekanbaru	784.376.941.000,00	2.171.590.365.093,00	0,36	798.138.148.000,00	2.235.018.502.739,00	0,36
<b>BENGGKULU</b>							

11	Kab. Bengkulu Utara	623.611.468.000,00	1.135.334.336.394,00	0,55	625.035.467.000,00	1.147.687.574.495,00	0,54
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>						
12	Kota Tanjung Pinang	448.692.800.000,00	913.479.668.124,00	0,49	457.336.775.945,00	921.104.842.117,00	0,50
	<b>JAWA BARAT</b>						
13	Kab. Bandung	2.059.845.225.000,00	5.081.260.297.655,00	0,41	2.060.202.697.000,00	5.000.506.391.369,00	0,41
14	Kota Bogor	791.929.143.000,00	2.289.359.362.675,00	0,35	791.929.143.000,00	2.328.703.432.669	0,34
15	Kota Bandung	1.643.076.905.000,00	5.735.006.649.088,00	0,29	1.643.079.905.000,00	5.939.997.423.418,00	0,28
	<b>JAWA TENGAH</b>						
16	Kab. Banjarnegara	959.486.489.000,00	2.168.175.161.490,00	0,44	959.486.489.000,00	2.074.653.161.695,00	0,46
17	Kab. Banyumas	1.373.971.809.000,00	3.221.258.052.894,00	0,43	1.373.971.809.000,00	3.265.926.651.861,00	0,42
18	Kab. Blora	926.754.302.000,00	2.013.829.444.230,00	0,46	926.682.649.031,00	2.120.671.434.967,00	0,44
19	Kab. Cilacap	1.360.370.867.000,00	3.067.274.791.140,00	0,44	1.362.443.518.000,00	3.072.112.464.787,00	0,44
20	Kab. Jepara	982.800.016.000,00	2.165.074.563.873,00	0,45	984.914.973.687,00	2.255.843.022.157,00	0,44
21	Kab. Kebumen	1.234.003.169.000,00	2.713.113.397.677,00	0,45	1.234.003.169.000,00	2.639.814.864.398,00	0,47
22	Kab. Klaten	1.271.590.067.902,00	2.581.515.295.917,00	0,49	1.237.967.327.000,00	2.577.961.130.135,00	0,48
23	Kab. Kudus	807.711.173.000,00	1.983.213.078.247,00	0,41	807.056.990.772,00	1.996.530.094.357,00	0,40
24	Kab. Magelang	1.060.027.733.000,00	2.271.336.015.858,00	0,47	1.060.540.612.000,00	2.302.190.543.616,00	0,46
25	Kab. Pati	1.186.296.947.000,00	2.769.242.943.472,00	0,43	1.189.796.870.000,00	2.381.101.318.854,00	0,50
26	Kab. Pekalongan	910.294.366.000,00	2.067.907.851.794,00	0,44	915.154.037.000,00	2.101.449.302.497,00	0,44
27	Kab. Purbalingga	881.574.483.000,00	1.957.994.897.247,00	0,45	881.574.483.000,00	1.948.442.029.100,00	0,45
28	Kab. Purworejo	924.251.795.000,00	2.114.807.792.154,00	0,44	924.251.795.000,00	2.049.782.186.054,00	0,45
29	Kab. Rembang	771.584.367.000,00	1.722.252.909.030,00	0,45	771.584.367.000,00	1.785.911.075.230,00	0,43

30	Kab. Sragen	1.049.016.918.000,00	2.187.032.686.896,00	0,48	1.049.016.918.000,00	2.173.350.423.558,00	0,48
31	Kab. Sukoharjo	906.416.629.000,00	2.055.571.033.667,00	0,44	906.416.629.000,00	2.055.517.964.074,00	0,44
32	Kab. Temanggung	793.801.136.000,00	1.779.850.394.321,00	0,45	793.485.677.000,00	1.731.235.867.161,00	0,46
33	Kab. Wonogiri	1.125.312.680.000,00	2.317.978.656.683,00	0,49	1.124.733.467.000,00	2.298.176.600.990,00	0,49
34	Kab. Wonosobo	826.626.357.000,00	1.829.290.334.360,00	0,45	827.791.657.000,00	1.851.441.024.405,00	0,45
35	Kota Semarang	1.190.422.387.000,00	3.964.574.307.584,00	0,30	1.190.422.387.000,00	4.234.394.060.362,00	0,28
36	Kota Surakarta	826.753.038.000,00	1.803.920.801.908,00	0,46	826.587.795.000,00	1.879.056.016.679,00	0,44
37	Kota Magelang	440.041.244.000,00	909.525.862.920,00	0,48	440.041.244.000,00	908.089.485.909,00	0,48
38	Kota Tegal	482.150.715.000,00	1.024.765.938.277,00	0,47	482.150.715.000,00	987.244.236.619,00	0,49
<b>DI YOGYAKARTA</b>							
39	Kab. Bantul	982.250.842.000,00	2.086.878.989.569,00	0,47	982.250.842.000,00	2.227.752.027.349,00	0,44
40	Kab. Sleman	996.492.454.000,00	2.615.515.097.399,00	0,38	996.492.454.000,00	2.712.794.080.456,00	0,37
<b>JAWA TIMUR</b>							
41	Kab. Blitar	1.108.687.006.000,00	2.307.812.881.171,00	0,48	1.109.812.753.000,00	2.352.130.150.238,00	0,47
42	Kab. Banyuwangi	1.375.784.247.000,00	2.997.644.018.346,54	0,46	1.375.784.247.000,00	2.732.022.666.956,37	0,50
43	Kab. Bojonegoro	932.445.113.000,00	3.024.200.425.253,00	0,31	932.357.598.649,00	4.823.792.241.464,00	0,19
44	Kab. Pamekasan	847.776.564.000,00	1.906.203.284.544,00	0,44	849.764.469.000,00	1.841.101.038.915,00	0,46
45	Kab. Ponorogo	1.043.916.636.000,00	2.215.197.920.702,00	0,47	1.038.913.988.811,00	2.300.334.167.916,00	0,45
46	Kab. Trenggalek	885.545.437.000,00	1.791.691.906.785,00	0,49	885.545.437.000,00	1.824.359.680.510,00	0,49
47	Kota Madiun	502.392.070.000,00	957.624.973.325,00	0,52	501.753.246.649,00	1.007.446.240.138,00	0,50
48	Kota Malang	844.576.426.000,00	1.971.916.657.660,00	0,43	844.477.164.310,00	2.040.194.240.908,00	0,41
49	Kota Surabaya	1.211.713.876.000,00	8.033.573.163.670,00	0,15	1.211.713.876.000,00	8.175.219.120.670,00	0,15

	<b>BALI</b>						
50	Kab. Karangasem	722.184.384.000,00	1.525.935.905.692,00	0,47	729.378.991.000,00	1.482.950.696.124,00	0,49
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>						
52	Kab. Lombok Tengah	981.107.649.000,00	1.917.035.737.683,00	0,51	985.217.157.000,00	1.976.693.763.598,00	0,50
53	Kab. Sumbawa Barat	400.284.503.000,00	1.238.784.568.471,00	0,32	400.229.072.000,00	1.085.140.803.316,00	0,37
54	Kota Bima	455.972.250.000,00	973.642.401.973,00	0,47	455.972.250.000,00	768.070.688.024,00	0,59
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>						
55	Kab. Tanah Bumbu	457.712.799.000,00	1.326.169.150.566,00	0,35	457.478.219.000,00	1.585.860.733.360,00	0,29
56	Kota Banjarbaru	428.542.067.000,00	1.010.895.104.862,00	0,42	428.542.067.000,00	1.087.333.979.005,00	0,39
57	Kota Banjarmasin	696.828.787.000,00	1.481.114.231.384,00	0,47	696.630.178.000,00	1.578.369.914.294,00	0,44
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>						
57	Kota Balikpapan	392.621.094.000,00	1.873.966.991.359,00	0,21	410.543.293.000,00	2.230.736.621.233,00	0,18
58	Kota Bontang	203.310.750.000,00	1.060.400.315.664,00	0,19	215.830.009.000,00	1.254.426.657.886,00	0,17
	<b>SULAWESI SELATAN</b>						
59	Kab. Gowa	835.733.631.000,00	1.790.263.499.730,00	0,47	837.326.483.000,00	1.781.396.471.000,00	0,47
60	Kota Pare-Pare	454.752.410.000,00	892.260.740.553,00	0,51	454.752.410.000,00	823.930.414.122,00	0,55
	<b>GORONTALO</b>						
61	Kab. Gorontalo	653.986.983.000,00	1.259.472.875.909,00	0,52	653.986.983.000,00	1.457.052.397.139,00	0,45

**LAMPIRAN 4**

**VARIABEL OPINI AUDIT (OP), JUMLAH PENDUDUK (POPUL) DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH (SIZE)**

No	Nama Pemerintah Daerah	Opini Audit		Jumlah Penduduk		Ukuran Pemerintah Daerah	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
<b>NAD</b>							
1	Kab. Aceh Barat	1	1	201.682	205.971	2.881.535.247.615,76	2.900.992.705.011,45
2	Kota Banda Aceh	1	1	259.913	265.111	5.981.471.416.543,05	5.615.309.114.795,11
<b>SUMATERA UTARA</b>							
3	Kab. Tapanuli Selatan	1	1	278.587	280.283	1.947.961.698.352,38	2.264.430.882.311,00
4	Kab. Pakpak Bharat	1	0	47.183	48.119	916.547.952.787,04	946.757.502.208,20
5	Padang Lawas	0	0	269.799	275.515	1.332.727.214.237,49	1.527.507.797.059,62
6	Labuhanbatu Utara	1	0	357.691	360.926	2.373.700.486.908,96	2.282.439.427.132,98
<b>SUMATERA BARAT</b>							
7	Kab. Padang Pariaman	1	0	411.003	413.272	1.293.847.951.538,90	1.230.967.601.085,29
8	Kab. Lima Puluh Kota	1	1	376.072	379.514	1.500.307.414.192,95	1.614.113.052.518,58
9	Kab. DHARMASRAYA	1	1	235.476	241.571	2.239.704.586.406,88	2.429.453.615.523,14
<b>RIAU</b>							
10	Kota Pekanbaru	1	1	1.091.008	1.117.359	5.259.687.878.073,36	7.398.075.505.045,26
<b>BENGGULU</b>							
11	Kab. Bengkulu Utara	1	1	298.757	304.386	1.563.604.402.869,60	1.611.320.910.558,40

<b>KEPULAUAN RIAU</b>							
12	Kota Tanjung Pinang	1	1	207.057	209.280	1.278.661.072.526,00	1.580.666.189.075,28
<b>JAWA BARAT</b>							
13	Kab. Bandung	1	1	3.657.701	3.717.291	9.662.590.831.208,71	10.429.388.051.099,90
14	Kota Bogor	1	1	1.081.009	1.096.828	7.993.898.200.465,57	8.134.004.234.559,65
15	Kota Bandung	0	1	2.497.938	2.503.708	23.963.431.940.297,50	43.615.425.497.527,20
<b>JAWA TENGAH</b>							
16	Kab. Banjarnegara	1	1	912.917	918.219	4.126.775.235.841,36	4.355.751.220.425,70
17	Kab. Banyumas	1	1	1.665.025	1.679.124	5.463.777.382.017,12	6.419.865.052.453,72
18	Kab. Blora	1	1	858.865	862.110	2.546.335.225.938,21	2.916.954.233.298,52
19	Kab. Cilacap	1	1	1.711.627	1.719.504	3.873.602.950.205,30	4.590.474.285.434,48
20	Kab. Jepara	1	1	1.223.198	1.240.600	5.886.321.483.841,04	6.132.256.105.267,00
21	Kab. Kebumen	1	1	1.192.007	1.195.092	4.409.902.555.258,02	4.548.688.282.913,09
22	Kab. Klaten	0	1	1.167.401	1.171.411	3.726.733.115.067,25	4.001.324.130.418,45
23	Kab. Kudus	1	1	851.478	861.430	4.066.126.399.735,40	4.159.213.413.942,49
24	Kab. Magelang	1	1	1.268.396	1.279.625	3.019.208.420.028,09	4.141.760.777.818,53
25	Kab. Pati	1	1	1.246.691	1.253.299	6.006.822.341.817,70	6.190.923.149.283,96
26	Kab. Pekalongan	1	1	886.197	891.892	2.469.666.568.415,46	2.763.481.985.690,29
27	Kab. Purbalingga	1	1	916.427	925.193	2.406.468.280.774,61	2.621.915.743.198,10
28	Kab. Purworejo	1	1	714.574	716.477	2.588.956.121.375,38	2.772.960.299.931,43
29	Kab. Rembang	0	1	628.922	633.584	1.699.744.280.051,09	2.083.375.254.651,96
30	Kab. Sragen	1	1	885.122	887.889	2.906.083.541.960,67	3.374.697.292.758,05

31	Kab. Sukoharjo	1	1	878.374	885.205	4.503.212.327.840,72	4.738.164.776.817,01
32	Kab. Temanggung	1	1	759.128	765.594	2.943.103.837.806,72	3.104.748.410.142,90
33	Kab. Wonogiri	1	1	954.706	957.106	3.196.412.795.233,76	3.441.897.165.791,76
34	Kab. Wonosobo	1	1	784.207	787.384	2.679.420.928.730,64	3.070.057.342.570,34
35	Kota Semarang	1	1	1.757.686	1.786.114	30.040.633.244.390,00	30.970.860.367.210,00
36	Kota Surakarta	1	1	516.102	517.887	7.469.527.044.609,68	7.733.569.021.424,03
37	Kota Magelang	1	1	121.474	121.872	3.579.209.910.129,97	3.865.401.096.564,41
38	Kota Tegal	0	1	248.094	249.003	2.264.247.290.378,40	2.402.980.382.890,01
<b>DI YOGYAKARTA</b>							
39	Bantul	1	1	995.264	1.006.692	3.045.637.995.200,45	3.255.020.103.752,86
40	Sleman	1	1	1.193.512	1.206.714	4.106.625.138.726,42	4.537.884.982.207,18
<b>JAWA TIMUR</b>							
41	Kab. Blitar	1	1	1.153.803	1.157.500	3.792.057.642.163,39	4.039.394.668.251,50
42	Kab. Banyuwangi	1	1	1.604.897	1.609.677	4.088.023.173.730,35	4.154.480.420.614,78
43	Kab. Bojonegoro	1	1	1.243.906	1.246.927	5.262.459.942.889,85	8.316.744.707.903,99
44	Kab. Pamekasan	1	1	863.004	871.497	3.202.523.870.567,79	3.483.606.764.607,15
45	Kab. Ponorogo	1	1	869.894	970.705	2.689.745.987.622,95	2.840.526.918.332,65
46	Kab. Trenggalek	1	1	693.104	694.902	2.220.438.963.559,53	2.346.933.275.438,45
47	Kota Madiun	1	1	176.099	176.697	2.398.412.871.680,95	2.528.060.139.623,89
48	Kota Malang	1	1	861.414	866.118	6.216.978.363.673,12	6.396.564.348.412,43
49	Kota Surabaya	1	1	2.874.699	2.885.555	41.176.250.937.330,60	42.764.672.922.352,50
<b>BALI</b>							

50	Kab. Karangasem	1	1	412.800	414.800	1.543.062.430.875,70	1.483.255.523.263,59
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>							
51	Kab. Lombok Tengah	1	1	930.797	939.409	2.680.154.363.274,44	2.808.264.929.698,74
52	Kab. Sumbawa Barat	1	1	140.890	144.707	2.310.242.689.840,44	2.342.326.095.191,36
53	Kota Bima	1	1	166.407	169.714	1.284.506.363.708,97	1.424.626.365.410,06
<b>KALIMANTAN SELATAN</b>							
54	Kab. Tanah Bumbu	1	1	343.193	351.673	2.962.915.333.401,88	3.373.140.128.315,08
55	Kota Banjarbaru	1	1	248.423	255.587	2.541.420.320.338,60	2.687.860.209.478,18
56	Kab. Banjarmasin	1	1	692.793	700.869	4.858.432.706.378,14	5.185.127.545.798,43
<b>KALIMANTAN TIMUR</b>							
57	Kota Balikpapan	1	1	636.012	645.727	7.863.461.310.524,38	11.074.760.685.563,60
58	Kota Bontang	1	1	170.611	174.206	4.606.274.351.828,55	4.697.436.263.645,97
<b>SULAWESI SELATAN</b>							
59	Kab. Gowa	1	1	748.200	760.607	3.429.713.438.299,34	3.759.988.175.398,66
60	Kota Pare-Pare	1	0	142.097	143.710	2.138.954.278.402,19	2.004.213.755.320,63
<b>GORONTALO</b>							
61	Kab. Gorontalo	1	1	374.923	373.858	1.426.419.455.119,65	1.621.056.255.185,73



LAMPIRAN 5

VARIABEL KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH (*WEALTH*)

No	Nama Pemerintah Daerah	Kekayaan Pemda					
		2017			2018		
		Realisasi PAD (Rp)	Jumlah penduduk	WEALTH (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Jumlah penduduk	WEALTH (Rp)
<b>NAD</b>							
1	Kab. Aceh Barat	161.742.858.644,00	201.682	801.969,73	150.499.049.236,00	205.971	730.680,77
2	Kota Banda Aceh	270.170.805.366,00	259.913	1.039.466,30	246.272.150.485,00	265.111	928.939,77
<b>SUMATERA UTARA</b>							
3	Kab. Tapanuli Selatan	104.722.613.705,00	278.587	375.906,32	140.044.217.234,00	280.283	499.652,91
4	Kab. Pakpak Bharat	29.320.487.447,00	47.183	621.420,58	20.061.207.923,00	48.119	416.908,25
5	Padang Lawas	46.509.729.525,00	269.799	172.386,59	47.455.308.607,00	275.515	172.242,20
6	Labuhanbatu Utara	52.690.086.354,00	357.691	147.306,16	57.010.690.545,00	360.926	157.956,73
<b>SUMATERA BARAT</b>							
7	Kab. Padang Pariaman	141.310.805.691,00	411.003	343.819,40	84.502.722.191,00	413.272	204.472,41
8	Kab. Lima Puluh Kota	119.771.917.449,00	376.072	318.481,35	73.440.842.296,00	379.514	193.512,87
9	Kab. Dharmasraya	98.937.393.387,00	235.476	420.159,14	84.116.203.862,00	241.571	348.204,89
<b>RIAU</b>							
10	Kota Pekanbaru	697.466.656.720,00	1.091.008	639.286,47	592.707.161.812,00	1.117.359	530.453,65
<b>BENGGKULU</b>							

11	Kab. Bengkulu Utara	70.272.813.710,00	298.757	235.217,30	117.688.313.638,00	304.386	386.641,68
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>						
12	Kota Tanjung Pinang	161.711.370.676,00	207.057	780.999,29	160.470.588.594,00	209.280	766.774,60
	<b>JAWA BARAT</b>						
13	Kab. Bandung	936.905.730.680,00	3.657.701	256.146,07	927.543.321.132,00	3.717.291	249.521,31
14	Kota Bogor	978.197.741.947,00	1.081.009	904.893,25	912.197.971.289,00	1.096.828	831.669,11
15	Kota Bandung	2.578.457.420.885,00	2.497.938	1.032.234,36	2.571.591.786.199,00	2.503.708	1.027.113,30
	<b>JAWA TENGAH</b>						
16	Kab. Banjarnegara	297.485.382.003,00	912.917	325.862,46	235.994.436.137,00	1.074.497	219.632,48
17	Kab. Banyumas	619.701.627.380,00	1.665.025	372.187,58	648.326.914.035,00	1.096.828	591.092,60
18	Kab. Blora	280.042.019.102,00	858.865	326.060,58	203.182.795.054,00	862.110	235.680,82
19	Kab. Cilacap	648.091.381.096	1.711.627	378.640,55	527.577.740.281,00	1.719.504	306.819,72
20	Kab. Jepara	325.530.346.533,00	1.223.198	266.130,54	369.330.454.700,00	1.240.600	297.703,09
21	Kab. Kebumen	443.608.862.461,00	1.192.007	372.152,90	352.047.092.282,00	1.195.092	294.577,40
22	Kab. Klaten	371.718.439.306,00	1.167.401	318.415,39	395.884.244.135,00	1.171.411	337.955,03
23	Kab. Kudus	366.031.203.778,00	851.478	429.877,46	337.364.609.424,00	861.430	391.633,23
24	Kab. Magelang	403.561.238.310,00	1.268.396	318.166,60	325.089.093.092,00	1.279.625	254.050,28
25	Kab. Pati	449.821.345.800,00	1.246.691	360.812,22	384.041.846.939,00	1.253.299	306.424,76
26	Kab. Pekalongan	305.394.299.061,00	886.197	344.612,20	311.288.143.682,00	891.892	349.020,00
27	Kab. Purbalingga	355.859.003.583,00	916.427	388.311,35	282.670.019.517,00	925.193	305.525,46
28	Kab. Purworejo	298.606.494.653,00	714.574	417.880,44	286.971.590.024,00	716.477	400.531,48
29	Kab. Rembang	300.319.284.807,00	628.922	477.514,36	296.676.436.263,00	633.584	468.251,15

30	Kab. Sragen	404.569.404.722,00	885.122	457.077,56	334.303.284.344,00	887.889	376.514,73
31	Kab. Sukoharjo	464.567.409.857,00	878.374	528.894,76	433.485.481.219,00	885.205	489.700,67
32	Kab. Temanggung	308.466.748.340,00	759.128	406.343,53	252.019.934.778,00	765.594	329.182,22
33	Kab. Wonogiri	333.840.434.905,00	954.706	349.678,79	269.032.427.619,00	957.106	281.089,48
34	Kab. Wonosobo	228.017.473.938,00	784.207	290.761,84	226.819.478.601,00	787.384	288.067,17
35	Kota Semarang	1.791.886.378.674,00	1.027.489	1.743.947,02	1.821.274.103.250,00	1.786.114	1.019.685,25
36	Kota Surakarta	527.544.224.971,00	516.102	1.022.170,47	527.739.388.159,00	517.887	1.019.024,20
37	Kota Magelang	233.557.714.356,00	121.474	1.922.697,16	249.877.424.347,00	121.872	2.050.326,77
38	Kota Tegal	306.830.656.135,00	248.094	1.236.751,62	275.021.448.594,00	249.003	1.104.490,50
<b>DI YOGYAKARTA</b>							
39	Bantul	494.179.068.471,00	995.264	496.530,64	462.653.956.230,00	1.006.692	459.578,46
40	Sleman	825.637.751.682,00	1.193.512	691.771,64	894.272.961.558,00	1.206.714	741.081,12
<b>JAWA TIMUR</b>							
41	Kab. Blitar	322.878.943.149,00	1.153.803	279.838,88	252.453.245.802,00	1.157.500	218.102,16
42	Kab. Banyuwangi	388.943.532.860,79	1.604.897	242.347,97	450.066.949.215,18	1.609.677	279.600,78
43	Kab. Bojonegoro	448.188.138.725,00	1.243.906	360.307,08	425.207.970.431,00	1.246.927	341.004,70
44	Kab. Pamekasan	243.311.843.020,00	863.004	281.935,94	222.410.664.049,00	871.497	255.205,31
45	Kab. Ponorogo	308.232.104.639,00	869.894	354.332,95	289.017.741.959,00	970.705	297.740,04
46	Kab. Trenggalek	253.224.852.674,00	693.104	365.349,00	233.808.792.639,00	694.902	336.462,97
47	Kota Madiun	230.608.717.369,00	176.099	1.309.540,19	230.847.977.147,00	176.697	1.306.462,35
48	Kota Malang	588.276.962.084,00	861.414	682.920,13	556.888.383.145,00	866.118	642.970,57
49	Kota Surabaya	5.161.844.571.172,00	2.874.699	1.795.612,19	4.973.031.004.728,00	2.885.555	1.723.422,71

	<b>BALI</b>						
50	Kab. Karangasem	198.663.672.239,00	412.800	481.258,90	200.362.025.515,00	414.800	483.032,85
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>						
51	Kab. Lombok Tengah	286.691.384.415,00	930.797	308.006,35	187.324.721.970,00	939.409	199.406,99
52	Kab. Sumbawa Barat	171.632.855.263,00	140.890	1.218.204,67	66.810.357.193,00	144.707	461.694,02
53	Kota Bima	52.465.170.258,00	166.407	315.282,23	46.115.436.512,00	169.714	271.724,41
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>						
54	Kab. Tanah Bumbu	149.588.782.498,00	343.193	435.873,64	185.351.937.575,00	351.673	527.057,63
55	Kota Banjarbaru	230.563.520.478,00	248.423	928.108,59	229.786.672.729,00	255.587	899.054,62
56	Kab. Banjarmasin	324.977.988.614,00	692.793	469.083,82	277.873.887.440,00	700.869	396.470,51
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>						
57	Kota Balikpapan	612.250.040.991,00	636.012	962.639,13	646.868.407.485,00	645.727	1.001.767,63
58	Kota Bontang	169.077.548.653,00	170.611	991.012,00	199.483.395.953,00	174.206	1.145.100,60
	<b>SULAWESI SELATAN</b>						
59	Kab. Gowa	268.339.203.299,00	748.200	358.646,36	217.112.642.503,00	760.607	285.446,55
60	Kota Pare-Pare	140.621.664.389,00	142.097	989.617,40	134.343.383.710,00	143.710	934.822,79
	<b>GORONTALO</b>						
61	Kab. Gorontalo	190.428.308.122,00	374.923	507.913,11	147.992.401.409,00	373.858	395.851,90

## LAMPIRAN 6

### HASIL PENGUJIAN MENGGUNAKAN SPSS

#### 1. STATISTIK DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
				Statistic	Std. Error	
DEPEND	122	.15	.66	.4424	.00853	.09423
OP	122	.00	1.00	.9180	.02494	.27545
POPUL	122	10.76	15.13	13.3200	.07838	.86573
SIZE	122	27.54	31.41	28.9090	.06664	.73605
WEALTH	122	11.90	14.53	13.0528	.05359	.59192
IIFR	122	.13	.96	.5657	.01824	.20149

#### 2. UJI ASUMSI KLASIK

##### a. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
DEPEND	.430	2.325
OP	.936	1.068
POPUL	.264	3.789
SIZE	.203	4.934
WEALTH	.374	2.677

a. Dependent Variable: IIFR

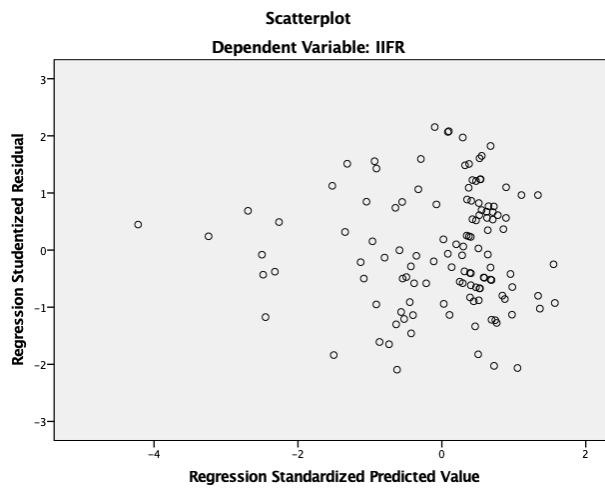
##### b. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.380 <sup>a</sup>	.144	.108	.19035	1.971

a. Predictors: (Constant), WEALTH, OP, POPUL, DEPEND, SIZE

b. Dependent Variable: IIFR

**c. Uji Heteroskedastisitas**



**d. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

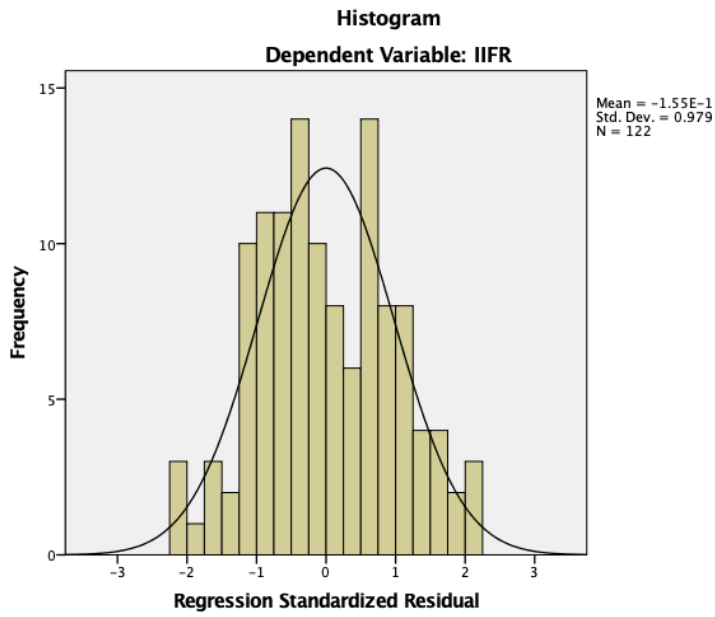
		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.18637269
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.053
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

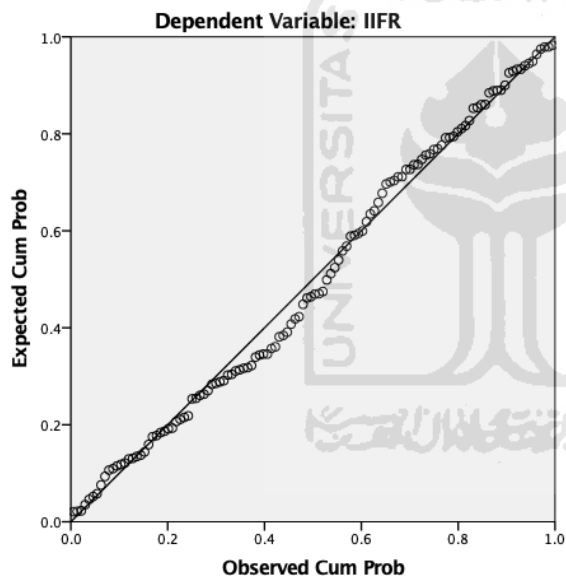
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### 3. PENGUJISN HIPOTESIS

#### a. Uji Parsial (t test)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.662	1.153		.575	.567		
DEPEND	-.294	.280	-.137	-1.049	.297	.430	2.325
OP	.157	.065	.214	2.411	.017	.936	1.068
POPUL	.069	.039	.296	1.771	.079	.264	3.789
SIZE	-.038	.052	-.140	-.733	.465	.203	4.934
WEALTH	.006	.048	.018	.125	.901	.374	2.677

